

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai potensi serta keanekaragaman sumber daya alam, baik terbaharukan maupun tak terbaharukan, yang dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Kekayaan sumber daya alam yang terkenal adalah sumber daya mineral berupa tambang batubara dan minyak bumi. Dari sisi letak geografis, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama Kawasan Timur karena letaknya yang cukup strategis di perbatasan Kawasan Tengah dan Kawasan Timur Indonesia.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Disamping itu juga perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, sebagai langkah awal dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018, terlebih dahulu pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup: gambaran umum kondisi daerah; evaluasi kinerja tahun lalu; dan permasalahan pembangunan daerah.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Provinsi Posisi Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 33' Lintang Utara (LU) dan 2° 25' Lintang Selatan (LS), 113° 44' Bujur Timur (BT) dan 119° 00' Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah:

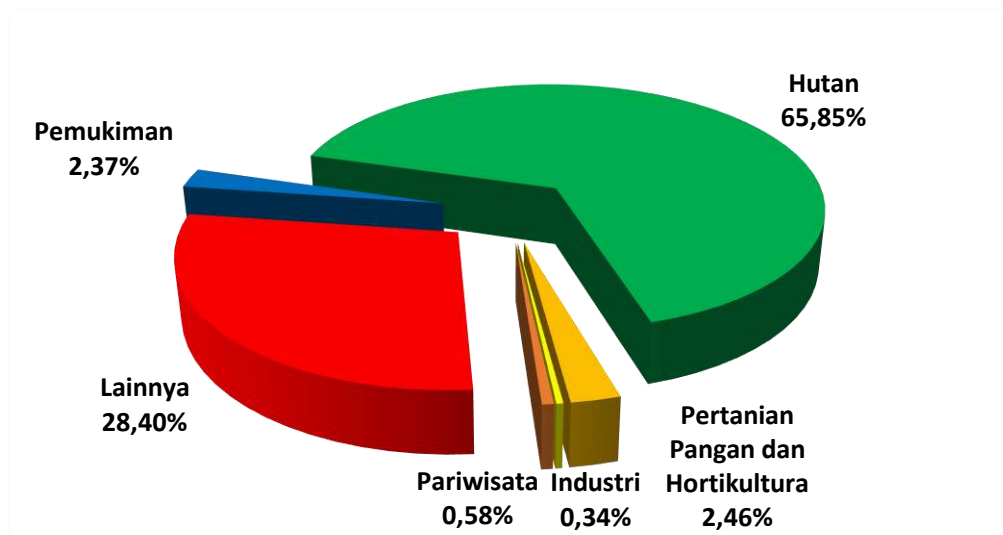
1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 16.732.065 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.734.692 ha, terdiri dari daratan seluas 12.638.931 ha dan perairan darat seluas 95.761 ha. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya

alam yang ada di dalamnya. Potensi Sumber daya lahan di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 seluas 12.638.931 Ha (75,54%) dari total luas wilayah.

Secara garis besar sumber daya lahan ini terbagi menjadi kawasan lindung seluas 2.278.799 Ha (18,03%), kawasan budidaya hutan seluas 6.043.937 Ha (47,82%), dan kawasan budidaya non hutan seluas 4.316.195 Ha (34,15%). Jika dilihat dari peruntukan kawasan, sebagian besar luas sumber daya lahan Kalimantan Timur masih berupa kawasan hutan yang mencapai 65,85% (11.018.065 Ha), sedangkan sisanya berupa wilayah permukiman yang hanya mencapai 2,37% (396.550 Ha), industri sebesar 0,34% (56.889 Ha), pariwisata sebesar 0,58% (97.046 Ha), perkebunan, pertanian pangan, dan hortikultura sebesar 2,46% (411.609 Ha) dan lainnya mencapai 28,40% (4.751.906 Ha).

Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2035



Sumber: Perda No. 1 tahun 2016 Tentang Rencana RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2035

Kemudian, dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1. Paser	1.109.696	10	144
2. Kutai Barat	1.370.992	16	194
3. Mahakam Ulu	1.944.941	5	50
4. Kutai Kartanegara	2.598.808	18	237
5. Kutai Timur	3.105.171	18	135
6. Berau	2.173.519	13	110
7. Penajam Paser Utara	292.373	4	54
8. Balikpapan	51.225	6	34
9. Samarinda	71.653	10	59
10. Bontang	16.314	3	15
Kalimantan Timur	12.734.692	103	1.032

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Tabel 2.2 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

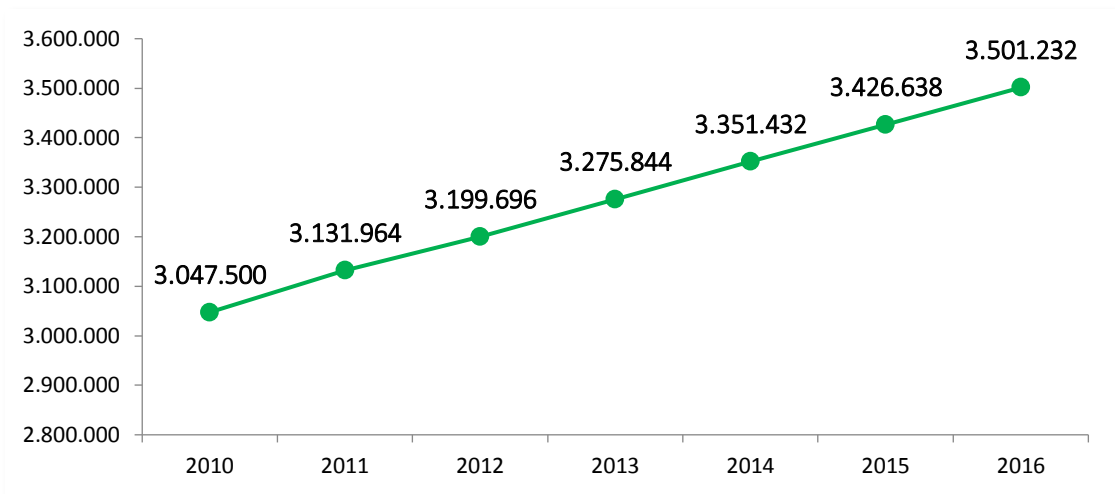
Tabel 2.2
Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (°C)			
	- Minimum	23	22,30	22
	- Maksimum	36,60	35,50	36,20
2	Kelembaban (%)	79	82	79
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.012,5	1.012,1	1.011,1
4	Kecepatan Angin (Knot)	4	4	4
5	Curah Hujan (mm)	2.480,8	2.263,8	3.027,5
6	Penyinaran Matahari (%)	48	55	49

Sumber: BMKG Wilayah Kaltim

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Hal ini terlihat pada saat Sensus Penduduk tahun 2000 dimana jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur sejumlah 2.127.050 jiwa dan jumlah tersebut meningkat pesat 10 tahun kemudian menjadi 3.047.500 jiwa pada tahun 2010. Terakhir, berdasarkan penghitungan proyeksi penduduk didapatkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 meningkat kembali menjadi 3.501.232 jiwa.

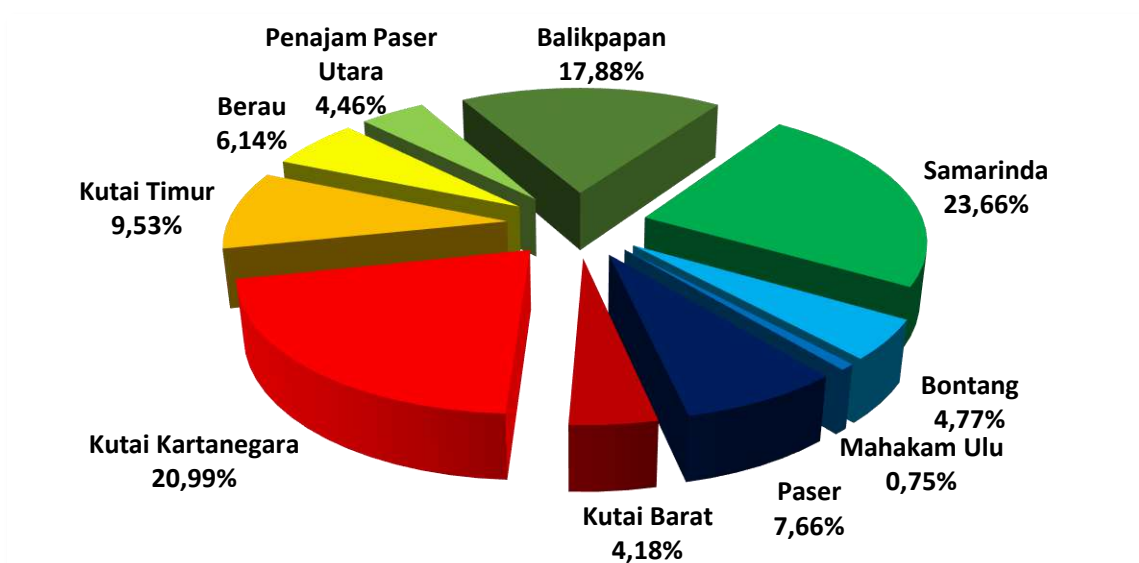
Gambar 2.2
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, Angka Proyeksi, 2017

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 23,66 persen. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang kurang dari 5 persen terdapat di Kota Bontang (4,77%), Kabupaten Penajam Paser Utara (4,46%), Kabupaten Kutai Barat (4,18%), dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Hulu yang bahkan tidak mencapai 1 persen (0,75%).

Gambar 2.3
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 mencapai 3.501.232 jiwa tersebar di 10 kabupaten/kota, dengan kota Samarinda sebagai kota yang berpenduduk paling padat, yaitu 828.303 jiwa. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh laki-laki dimana *sex ratio* mencapai 110,29. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 110-111 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Fenomena ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.3
Luas Wilayah, *Sex Ratio*, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

No	Kab/Kota	Penduduk			<i>Sex Ratio</i>	Kepadatan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	Total			
1	Paser	142.377	125.884	268.261	113,10	24,17	2,44
2	Kutai Barat	77.293	69.014	146.307	112,00	10,67	0,60
3	Kutai Kartanegara	385.994	349.022	735.016	110,59	28,28	2,55
4	Kutai Timur	180.763	152.828	333.591	118,28	10,74	4,37
5	Berau	115.521	99.307	214.828	116,33	9,88	2,93
6	Penajam Paser Utara	81.563	74.438	156.001	109,57	53,36	1,34
7	Balikpapan	323.394	302.574	625.968	106,88	1.222,85	1,81
8	Samarinda	428.155	400.148	828.303	107,00	1.155,99	1,82
9	Bontang	87.297	79.571	166.868	109,71	1.022,85	2,37
10	Mahakam Ulu	13.936	12.153	26.089	114,67	1,34	0,60
Kalimantan Timur		1.836.293	1.664.939	3.501.232	110,29	27,49	2,25

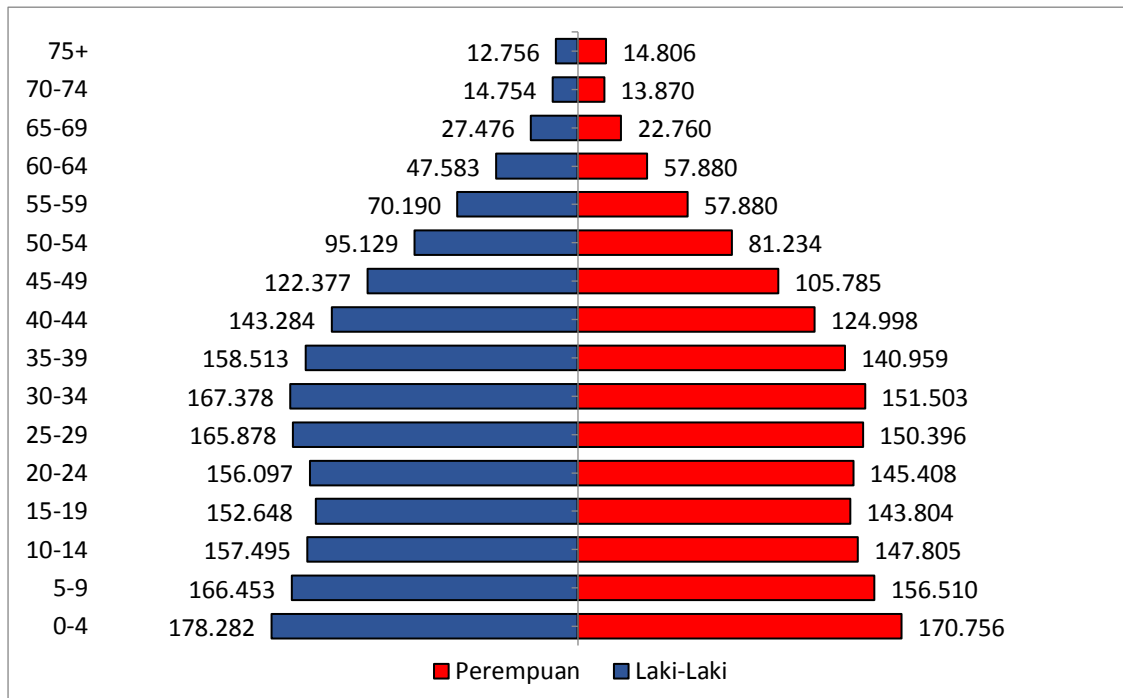
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Secara umum, kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur sebesar 27,49 jiwa/km². Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang tinggal di dalamnya. Selain itu, persebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang tidak merata menyebabkan terjadinya perbedaan kepadatan penduduk antardaerah yang mencolok, terutama antardaerah kabupaten dengan kota. Wilayah 7 (tujuh) kabupaten dengan total luas 98,91 persen dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur dihuni oleh sekitar 53,70 persen dari total penduduk Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan selebihnya, yaitu sekitar 46,30 persen menetap di 3 (tiga) daerah kota dengan luas hanya 1,09 persen dari luas wilayah total Provinsi Kalimantan Timur. Akibatnya, kepadatan penduduk di daerah kabupaten hanya berkisar 1,34-53,36 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk di Kota Samarinda sebanyak 1.155,99 jiwa/km², Kota Balikpapan 1.222,85 jiwa/km², dan Kota Bontang 1.022,85 jiwa/km².

Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif, sebagaimana tampak pada gambar 2.4. Piramida penduduk Provinsi Kalimantan Timur ini selain mengindikasikan rendahnya tingkat ketergantungan penduduk non produktif, juga mengindikasikan

cukup tingginya derajat kesehatan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tampak pada tingginya jumlah penduduk pada kelompok umur tua.

Gambar 2.4
Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

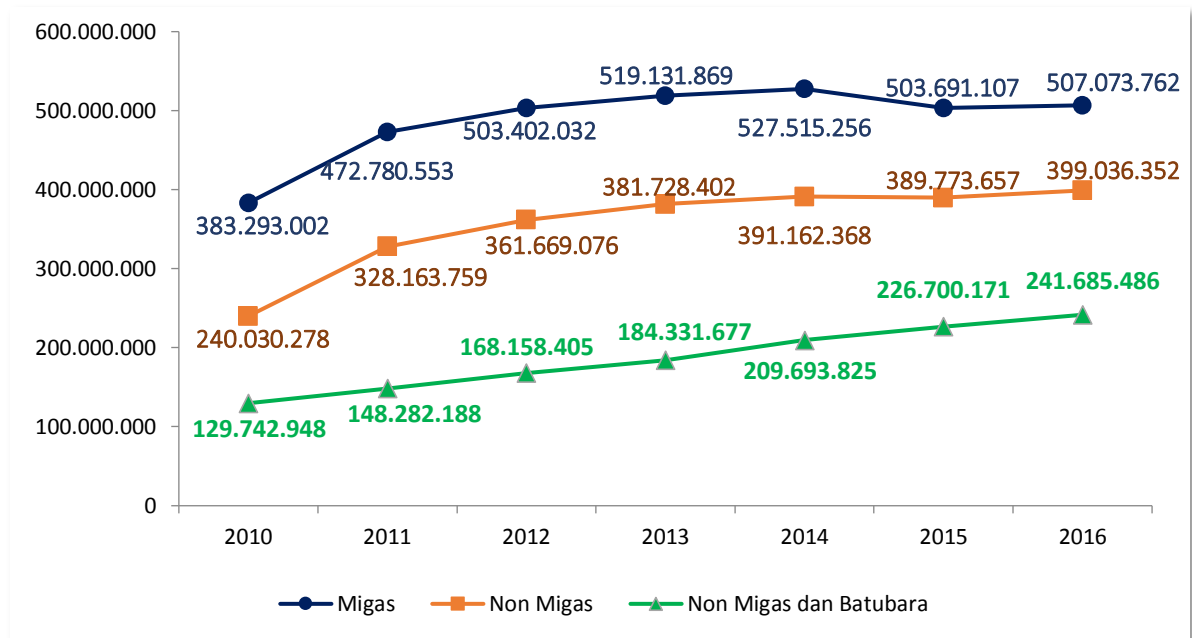
Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di Provinsi Kalimantan Timur yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. PDRB Provinsi Kalimantan Timur akan menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja perekonomian daerah, baik dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kemampuan, potensi, dan kinerja sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam mengembangkan perekonomian daerah sangat penting

untuk dianalisis guna kepentingan evaluasi, monitoring, hingga perencanaan pembangunan berbasis ekonomi.

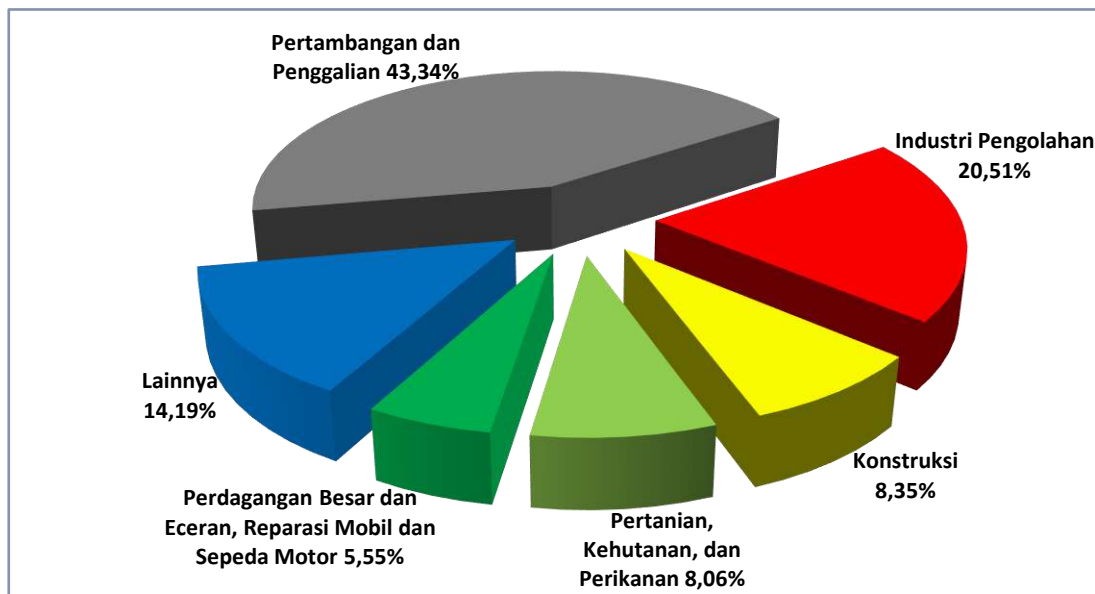
Gambar 2.5
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur selalu mengalami peningkatan di setiap periodenya meskipun peningkatannya semakin lama terlihat semakin melambat hingga akhirnya secara umum menurun pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dengan besaran 507,07 trilyun rupiah, dibanding dengan tahun 2015 mencapai 503,69 trilyun rupiah. Dominasi PDRB Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor yang terkait dengan batubara dan migas sehingga jika dominasi sektor sumber daya tak terbarukan tersebut dihilangkan maka PDRB Provinsi Kalimantan Timur hanya mencapai 241,69 trilyun rupiah. Meskipun pada tahun 2016 perekonomian Kalimantan Timur tumbuh negatif, yang ditandai dengan penurunan drastis nilai PDRB migas, akan tetapi nilai PDRB non migas dan batubara terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 2.6
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 (persen)

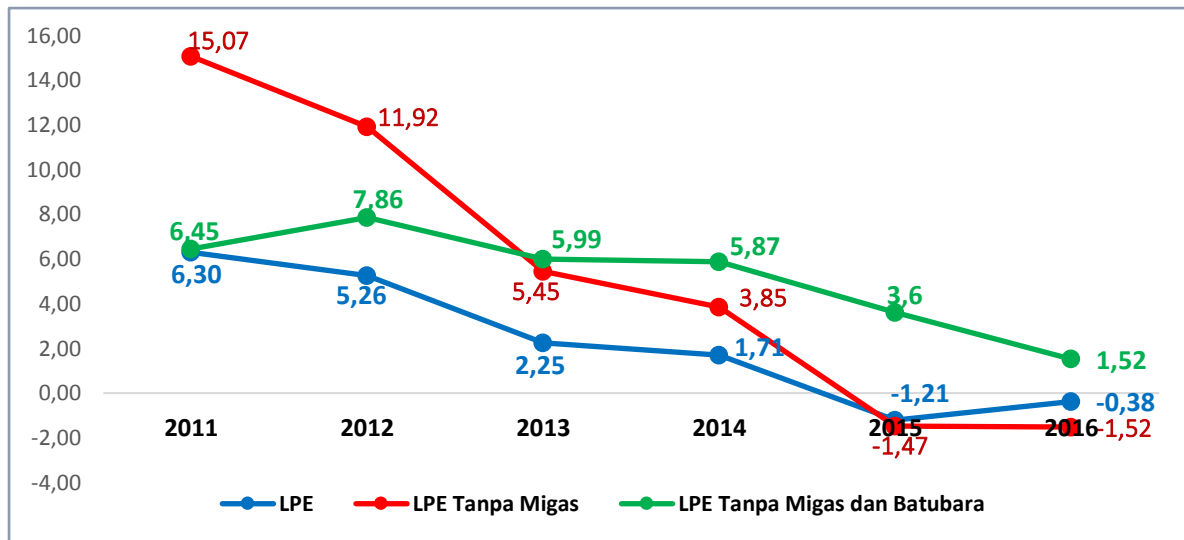


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Pembentukan perekonomian daerah didominasi oleh kelompok pertambangan dan penggalan yang mencapai 43,34 persen. Meskipun demikian, dominasi struktur ekonomi kategori pertambangan dan penggalan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sebagaimana bisa dilihat dari kontribusi sektor dan pertumbuhan sektoralnya yang mengalami perlambatan, bahkan pertumbuhan negatif pada tahun 2016. Tingginya dominasi sumber daya alam tak terbaharui terhadap pembentukan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur ini akan menimbulkan gejolak perekonomian di kemudian hari jika tidak dibarengi dengan pengelolaan perekonomian pembangunan secara berkelanjutan.

Hal menarik terkait perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur adalah meskipun pertumbuhan ekonomi di Provinsi ini jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, namun kontribusi Provinsi Kalimantan Timur terhadap pendapatan nasional sangat tinggi. Hal ini dikarenakan tingginya kontribusi sektor migas dan batubara dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pada kontribusi PDRB Nasional. Namun yang perlu digarisbawahi adalah produksi minyak, gas, dan batubara terus menurun dari tahun ke tahun yang menyebabkan nilai tambahnya menurun sehingga pertumbuhan ekonomi juga ikut menurun, meskipun PDRB masih tergolong tinggi.

Gambar 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2016 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur mengalami perlambatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar -1,21 persen, melambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,71 persen. Perlambatan ini sebagian besar dikarenakan terjadinya pertumbuhan negatif pada sektor yang memberikan kontribusi signifikan dalam struktur perekonomian daerah, yaitu kategori pertambangan dan penggalian (-3,52%). Hal ini terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi jika dikeluarkan sektor yang terkait batubara dan migasnya mencapai 3,60 persen. Pada tahun 2016, ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tumbuh negatif sebesar -0,38 persen sebagai akibat dari penurunan laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 43,34 persen, jauh di bawah pertumbuhan tahun 2015 sebesar 45,16 persen. Jika dilihat berdasarkan kategorinya, pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada kategori pengadaan listrik dan gas (21,24%) serta jasa pendidikan (12,23%).

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2016 (persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014 ^{*r}	2015 ^{*r}	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,44	6,78	4,55	0,46
B	Pertambangan dan Penggalian	1,85	(0,40)	(4,89)	(3,52)
C	Industri Pengolahan	(1,81)	0,45	2,66	5,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,56	21,24	30,43	8,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,26	4,55	2,56	6,57
F	Konstruksi	4,91	6,33	(0,94)	(3,41)
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,26	5,13	1,42	2,75

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014 ^{*r}	2015 ^{*r}	2016
H	Transportasi dan Pergudangan	6,51	7,26	2,76	3,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,34	5,65	5,33	3,67
J	Informasi dan Komunikasi	9,11	8,45	7,66	7,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	14,37	2,41	2,05	1,83
L	<i>Real Estate</i>	8,23	8,29	3,59	(0,83)
M,N	Jasa Perusahaan	8,22	8,29	(3,75)	(4,25)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,74	9,29	4,20	(3,05)
P	Jasa Pendidikan	18,74	12,23	9,88	7,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,12	9,03	10,53	9,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,24	7,38	8,81	9,65
Laju Pertumbuhan Ekonomi		2,25	1,71	(1,21)	(0,38)

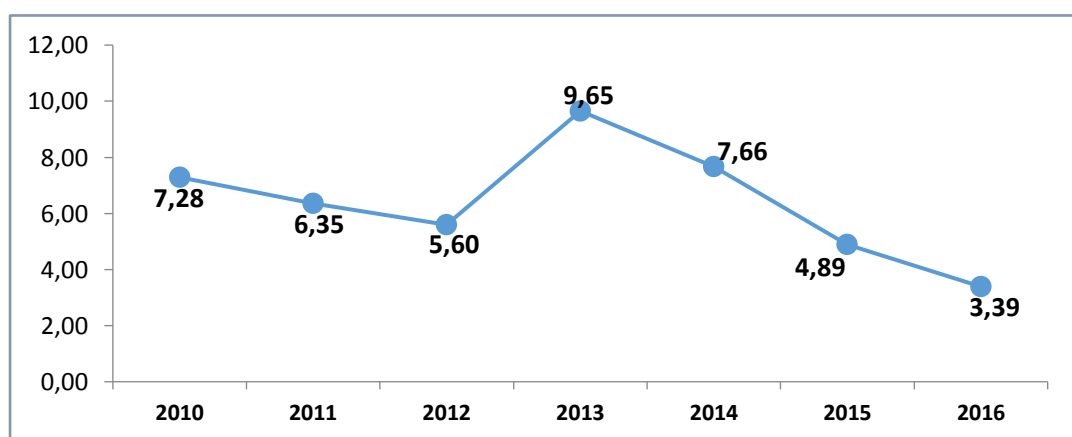
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

B. Laju Inflasi

Inflasi, dalam [ilmu ekonomi](#), merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus menerus (*continue*). Inflasi merupakan proses dari suatu peristiwa dan bukan tergantung tinggi rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Inflasi, terkait dengan mekanisme pasar, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Laju inflasi yang cukup fluktuatif dan tergolong tinggi dalam kegiatan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.8
Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun dimana paling tinggi terjadi pada tahun 2013 (9,65%) dan paling rendah di tahun 2016 (3,39%). Rendahnya laju inflasi pada tahun terakhir ini dipicu oleh beberapa faktor yang menyebabkan kelesuan perekonomian daerah, yaitu: terhambatnya distribusi berbagai komoditas barang dan jasa; kelangkaan beberapa komoditas, baik karena aksi spekulasi/penimbunan barang maupun keterbatasan produksi komoditas tersebut; hingga kebijakan perekonomian nasional yang berdampak pada perekonomian regional.

Laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur dibentuk oleh dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan (angka yang dihasilkan masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Utara). Berikut inflasi di setiap kota IHK di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Tabel 2.5
Laju Inflasi Menurut Kota IHK Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2016 (persen)

Tahun	Samarinda	Balikpapan	Kalimantan Timur	Nasional
2010	7,00	7,38	7,28	6,96
2011	6,23	6,45	6,35	3,79
2012	4,81	6,41	5,60	4,30
2013	10,37	8,56	9,65	8,38
2014	6,74	7,43	7,66	8,36
2015	4,24	6,26	4,89	3,35
2016	2,83	4,13	3,39	3,02

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

C. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan juga merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah. Oleh karena itu, tugas utama pemerintah terkait kemiskinan adalah berusaha meminimalisir dan memberdayakan masyarakat sehingga memiliki daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Indikator yang sangat nyata dalam melihat kemiskinan di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan, yang menyatakan persentase penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk di wilayah tersebut.

Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur sebanyak 324.800 orang (11,04%), tahun 2008 turun menjadi 286.440 orang (9,51%), pada tahun 2009 berjumlah 239.220 (7,73%) dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2016 menjadi

212.920 (6,11%) meskipun dari sisi jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi akan tetapi dari sisi persentase terus mengalami penurunan.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Selama Maret 2015 – Maret 2016, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,73 persen, yaitu dari Rp 473.710,- per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp. 511.205,- per kapita per bulan pada Maret 2016. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Komoditi makanan yang mempunyai andil terbesar dalam pembentuk garis kemiskinan makanan di Kalimantan Timur pada bulan Maret 2016 antara daerah perkotaan dan perdesaan terdapat kemiripan pola. Dari enam komoditi penyumbang garis kemiskinan makanan terbesar di pedesaan dan di perkotaan, empat komoditi terbesarnya terdapat persamaan. Empat jenis komoditi terbesar yang sama yaitu beras, rokok kretek filter, telur ayam ras dan mie instan. Berikut adalah jenis komoditi penyusun garis kemiskinan makanan untuk daerah perkotaan secara berturut-turut adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan dan gula pasir. Sedangkan di daerah perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, mie instan dan bawang merah. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7. Persentase komoditi makanan terhadap garis kemiskinan makanan menurut daerah.

Tabel 2.6
Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2015	336.356	137.353	473.710	212,89	6,23
Maret 2016	363.918	147.287	511.205	212,92	6,11

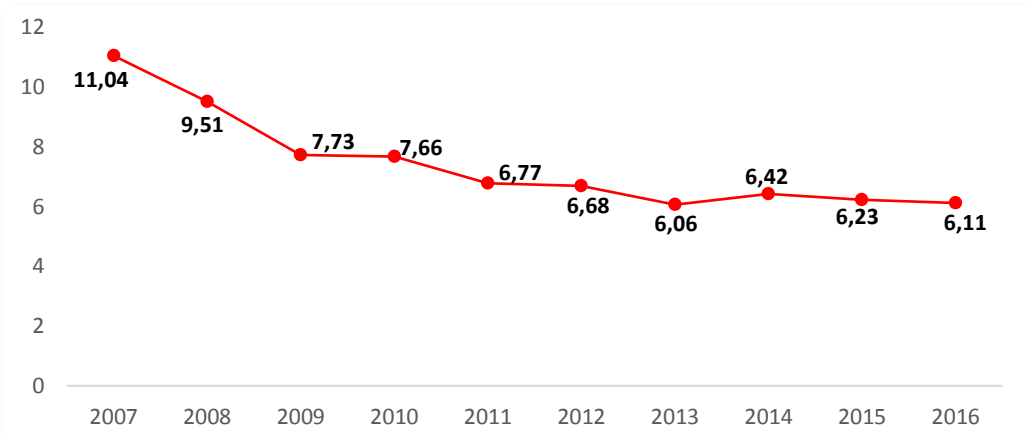
Tabel 2.7
Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan Menurut Daerah, Maret 2016

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Beras	26,86	Beras	30,70
2	Rokok Kretek Filter	13,39	Rokok Kretek Filter	14,41
3	Telur ayam ras	6,12	Telur ayam ras	6,41
4	Daging ayam ras	5,69	Gula Pasir	4,83

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
5	Mie Instan	4,24	Mie Instan	4,64
6	Gula Pasir	3,41	Bawang merah	3,19
7	Tongkol/Tuna/Cakalang	3,30	Daging ayam ras	3,03
8	Bawang merah	2,64	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,49
9	Kue basah	2,62	Cabe rawit	2,19
10	Susu Bubuk	2,48	Bandeng	1,98
11	Roti	2,37	Tempe	1,83
12	Tempe	2,22	Susu Kental Manis	1,75
13	Kembung	2,21	Kembung	1,67
14	Tahu	1,86	Kopi Bubuk & kopi instan (sachet)	1,65
15	Cabe rawit	1,84	Kue Basah	1,65

Gambar 2.9

Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007-2016 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

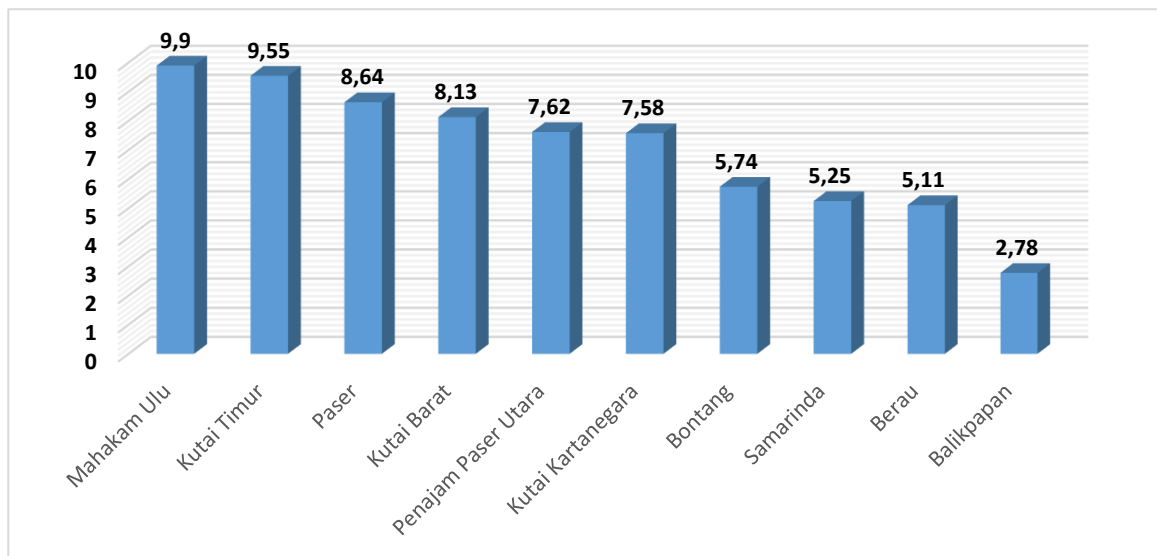
Tabel 2.8

Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2015 (persen)

No	Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Paser	9,48	7,91	7,64	7,94	7,87	8,64
2	Kutai Barat	9,9	8,25	8,28	7,7	7,53	8,13
3	Kutai Kartanegara	8,68	7,21	6,94	7,52	7,43	7,58
4	Kutai Timur	11,38	9,43	8,77	9,06	9,1	9,55
5	Berau	6,6	5,46	5,24	4,83	4,76	5,11
6	Penajam Paser Utara	10,46	8,67	8,57	7,7	7,56	7,62
7	Balikpapan	4,07	3,39	3,3	2,48	2,46	2,78
8	Samarinda	5,21	4,31	4,18	4,63	4,56	5,25
9	Bontang	6,67	5,40	5,2	5,16	5,1	5,74
10	Mahakam Ulu						9,9

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

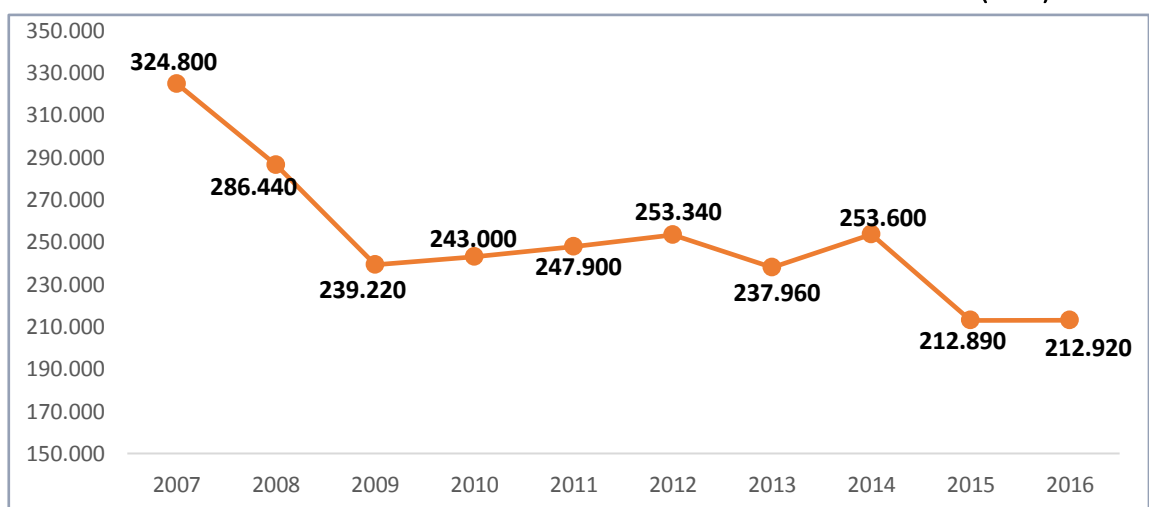
Gambar 2.10
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Pada grafik dan tabel diatas terlihat bahwa di kabupaten/kota justru mengalami peningkatan tingkat kemiskinan di tahun 2015. Pada tahun 2015 tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Mahakam Ulu mencapai angka 9,9 persen dan terendah berada di Kota Balikpapan dengan angka 2,78 persen. Walaupun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dan jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 11,22% pada tahun 2015, namun dilihat menurut kabupaten/kota masih terdapat permasalahan utama yang dihadapi kabupaten adalah masih minimnya infrastruktur transportasi yang memberikan akses pelayanan kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

Gambar 2.11
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007-2016 (Jiwa)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

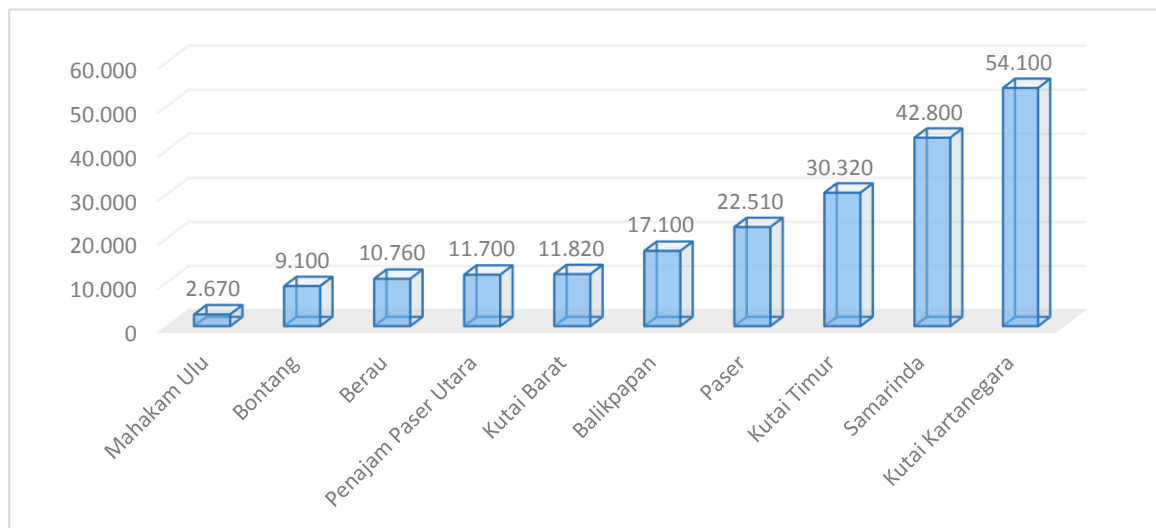
Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2015 (jiwa)

No	Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Paser	21.964	19.100	19.000	20.144	20.340	22.510
2	Kutai Barat	16.428	14.300	14.200	13.204	12.920	11.820
3	Kutai Kartanegara	54.400	47.300	47.100	52.143	52.530	54.100
4	Kutai Timur	28.916	25.300	25.200	27.174	28.300	30.320
5	Berau	11.847	10.300	10.300	9.690	9.770	10.760
6	Penajam Paser Utara	14.930	13.000	12.900	11.694	11.580	11.700
7	Balikpapan	22.746	19.800	19.700	14.918	15.020	17.100
8	Samarinda	37.847	32.900	32.800	36.605	36.650	42.800
9	Bontang	9.396	8.100	8.100	8.153	8.210	9.100
10	Mahakam Ulu						2.670

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Di tingkat kabupaten/kota hanya Kabupaten Kutai Barat yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 12.920 jiwa pada tahun 2014 menurun menjadi 11.820 jiwa pada tahun 2015.

Gambar 2.12
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 (Jiwa)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Penurunan tingkat kemiskinan maupun jumlah penduduk miskin ini merupakan capaian positif Pemerintah Daerah, meskipun begitu perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi sebagai pengayom masyarakat agar selalu memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan setiap realisasinya berjalan seiring dengan program dari pemerintah pusat.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

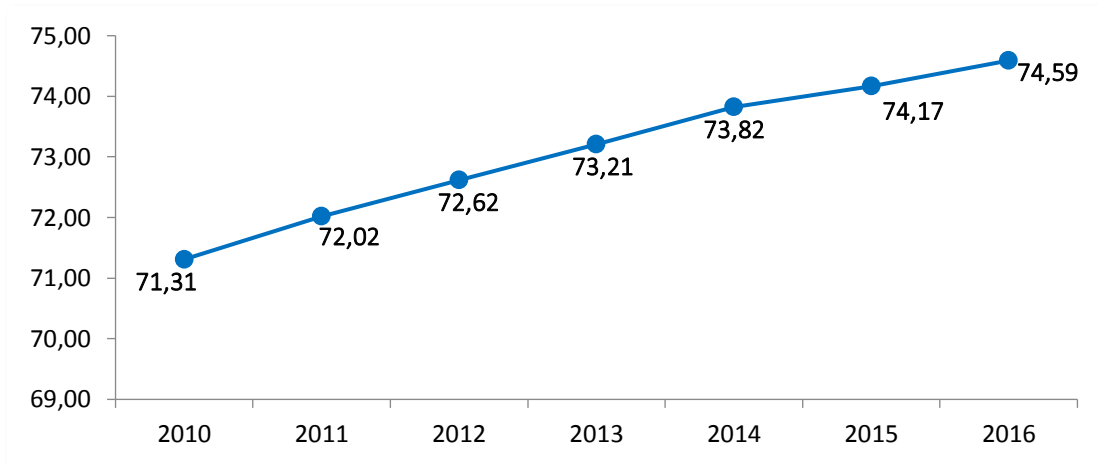
Fokus kesejahteraan sosial masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga seni budaya dan olahraga. Namun, dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) maupun horizontal (kehidupan lebih baik di segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berkecakupan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Pada periode ini, IPM dihitung dengan menggunakan metodologi baru utamanya dalam pendekatan penghitungan indeks pendidikan. Pada metode baru ini, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita (standar hidup layak/ekonomi).

Gambar 2.13
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2016. IPM Provinsi Kalimantan Timur meningkat dari 71,31 pada tahun 2010 menjadi 74,59 pada tahun 2016. Selama periode 2010 hingga 2016 IPM Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan positif, namun status pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur masih belum mengalami lompatan status. Walaupun pembangunan manusia di tahun 2016 berhasil mengalami percepatan, jika diamati sepanjang periode 2011-2015, terdapat kecenderungan perlambatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur. Hingga saat ini, pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur masih berstatus “tinggi” menduduki peringkat ke 3 (tiga) nasional.

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, wilayah dengan IPM tinggi diduduki oleh wilayah perkotaan dengan IPM tertinggi adalah di Kota Bontang yang mencapai 78,92, diikuti oleh Kota Samarinda dengan IPM 78,91, dan Kota Balikpapan ditempat ketiga. Dibandingkan dengan wilayah kota, wilayah kabupaten memiliki kesenjangan IPM yang cukup jauh dengan wilayah kota dimana IPM tertinggi adalah Kabupaten Berau dengan IPM sebesar 73,05 dan terendah adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan IPM sebesar 65,51.

Tabel 2.10
Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

No	Kab/Kota	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran per kapita (Rp ribu)	IPM
1	Paser	72,02	12,96	8,19	10.171	71,00
2	Kutai Barat	72,28	12,75	8,03	9.492	69,99
3	Kutai Kartanegara	71,64	13,26	8,71	10.593	72,19
4	Kutai Timur	72,45	12,44	8,72	9.960	71,10
5	Berau	71,37	13,18	8,78	11.675	73,05
6	Penajam Paser Utara	70,80	12,46	7,60	11.019	69,96

No	Kab/Kota	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran per kapita (Rp ribu)	IPM
7	Mahakam Ulu	71,19	12,42	7,37	7.281	65,51
8	Balikpapan	73,96	13,59	10,54	13.883	78,57
9	Samarinda	73,68	14,23	10,33	14.010	78,91
10	Bontang	73,71	12,79	10,39	16.157	78,92

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

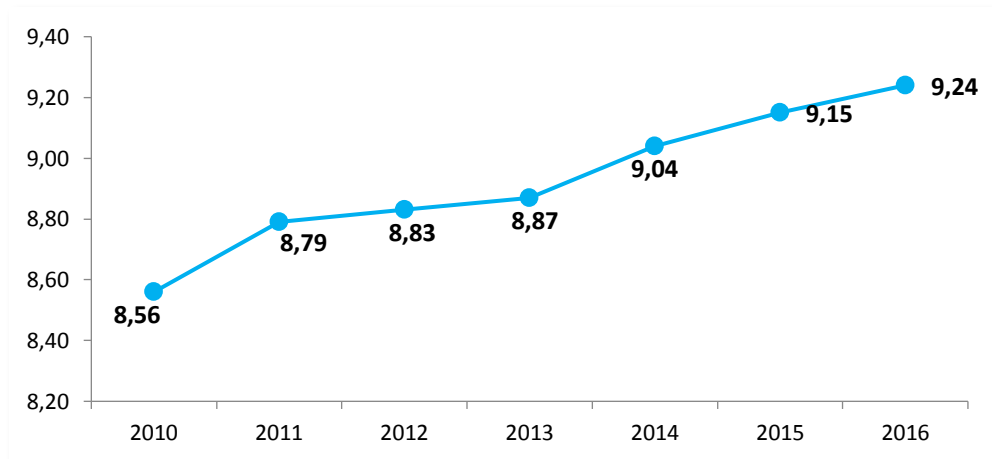
B. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang pendidikan:

1) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun terakhir (2016) mencapai 9,24 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I).

Gambar 2.14
Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

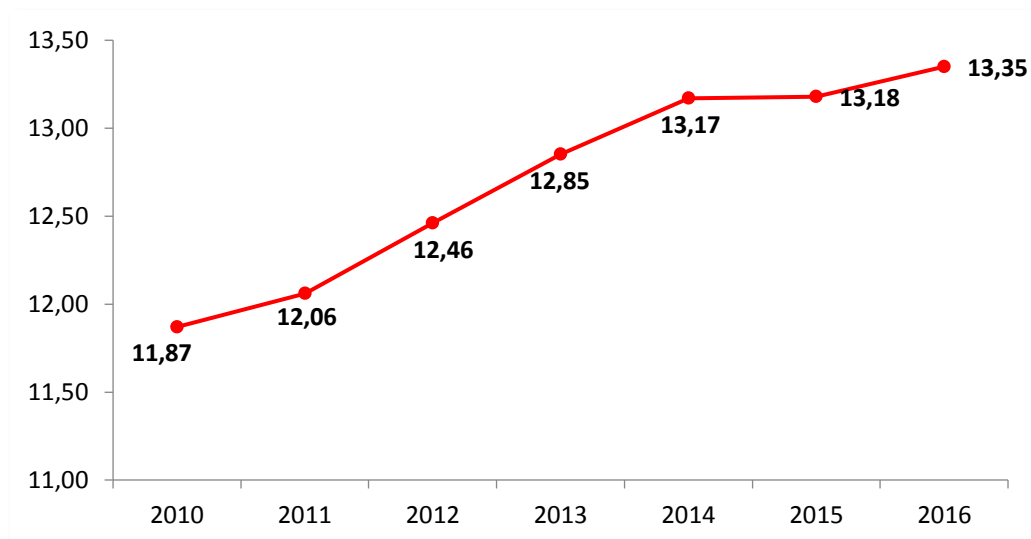
2) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator baru dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang mengimplementasikan peningkatan pembangunan di bidang

pendidikan. Harapan Lama Sekolah mengindikasikan harapan penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan ke depannya untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Di tahun 2016, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 13,35 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. Hal ini sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Gambar 2.15
Harapan Usia Lama Sekolah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016 (Tahun)



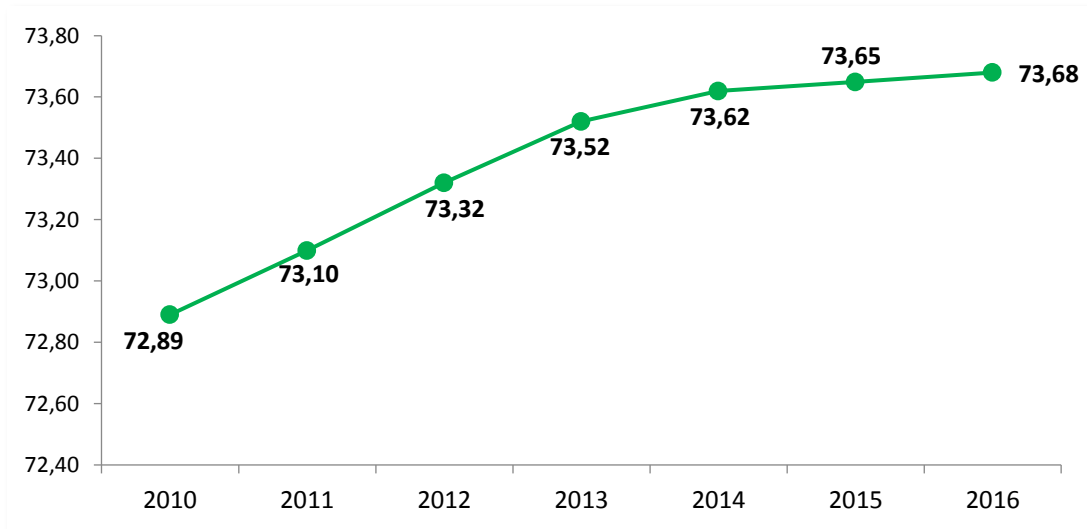
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

C. Kesehatan

Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian maupun pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator kinerja pembangunan di bidang kesehatan diwakili oleh Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun.

Di Provinsi Kalimantan Timur, Angka Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 mencapai 73,65 tahun dan meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 73,68 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2016 akan memiliki harapan hidup hingga usia 73-74 tahun.

Gambar 2.16
Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pendidikan adalah dengan menganalisis Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya.

Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tingginya persentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan merupakan target mutlak yang harus dicapai oleh pemerintah. APS Provinsi Kalimantan Timur di setiap jenjang usia sekolah terus mengalami *trend* kenaikan yang mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan semakin meningkat.

Tabel 2.11
Angka Partisipasi Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2016

Angka Partisipasi Sekolah					
Usia Sekolah	2012	2013	2014	2015	2016
7-12	97,50	97,50	97,60	97,68	97,69
13-15	89,00	89,00	89,00	89,12	89,13
16-18	74,00	74,00	74,24	74,24	74,25
Angka Partisipasi Kasar					
Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016

Angka Partisipasi Sekolah					
SD	107,76	107,57	111,04	112,61	113,76
SLTP	93,24	91,06	91,49	97,90	97,78
SLTA	80,08	82,21	85,54	90,31	87,93
Angka Partisipasi Murni					
Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
SD	94,37	95,91	96,70	97,00	97,69
SLTP	74,37	76,10	78,73	79,06	89,13
SLTA	59,75	62,22	67,03	67,78	74,25

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2016 (*): Data Belum Tersedia

1) Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah

Rasio Murid-Guru ini menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 2.12
Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.650	363.590	22.144	16,42	220,36
Swasta	195	49.546	3.075	16,11	254,08
MI	114	22.962	1.443	15,91	201,42
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	416	123.990	7.646	16,22	298,05
Swasta	184	28.500	2.123	13,42	154,89
MTs	145	26.826	2.199	12,20	185,00
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	135	53.932	3.576	15,08	399,50
Swasta	76	9.197	859	10,71	121,01
MA	68	9.136	989	9,24	134,35
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	82	40.963	2.960	13,84	499,55
Swasta	130	28.519	1.926	14,81	219,38

Sumber: Dinas Pendidikan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 9 perguruan tinggi dan 45 akademi, baik negeri maupun swasta, sebagai bagian dari sarana pendidikan masyarakat untuk mengenyam pendidikan lebih baik. Pada tahun 2014, jumlah mahasiswa yang

terdaftar di berbagai akademi dan perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 95.642 mahasiswa.

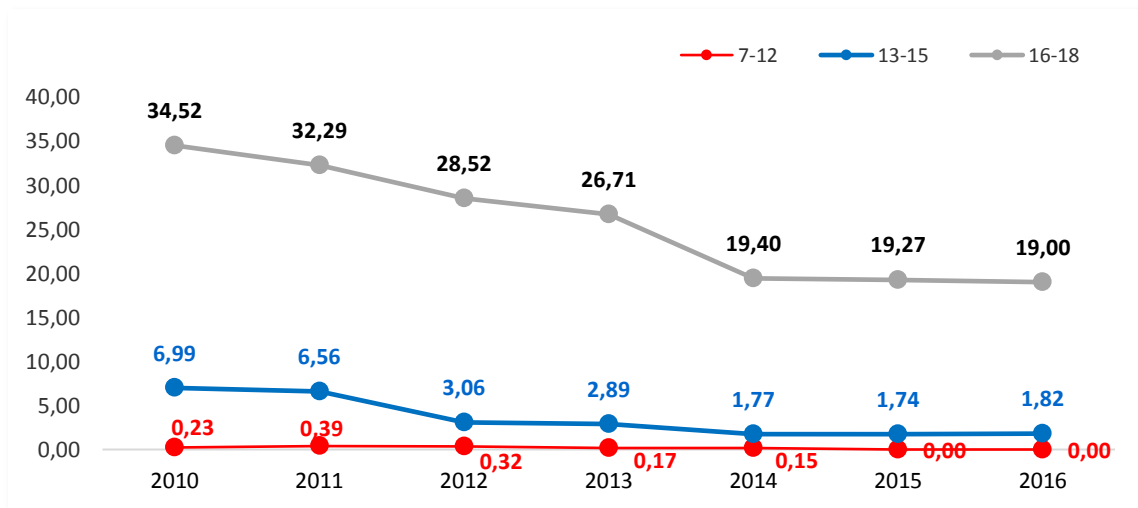
Tabel 2.13
Indikator Perguruan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

Kategori	Jumlah PT/Akademi	Jumlah Fakultas/Jurusan	Jumlah Mahasiswa
Perguruan Tinggi			
Negeri	2	22	41.690
Swasta	7	11	24.882
Akademi			
Negeri	5	24	6.117
Swasta	40	0	22.953
Jumlah	54	57	95.642

Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016

Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur semakin lama semakin menurun meskipun pada jenjang pendidikan menengah ke atas (SMA) masih cukup tinggi. Pada tahun 2016, angka putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar berhasil mencapai nol persen, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) mencapai 1,82 persen, sedangkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah ke atas (SMA) mencapai 19 persen.

Gambar 2.17
Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2016

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi prasyarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait

pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan akan memiliki *multiplier effect* pada program-program pembangunan kedepannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah melihat bagaimana perkembangan kesehatan masyarakat, baik dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, maupun tingkat kesehatan penduduk. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melakukan peningkatan berbagai pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan berkualitas. Berbagai upaya peningkatan tersebut antara lain dilakukannya penyempurnaan pada beberapa program pembangunan kesehatan masyarakat, seperti peningkatan kesadaran akan kesehatan ibu dan bayi, kesadaran untuk menggunakan fasilitas kesehatan resmi, hingga terkait pola hidup sehat di masyarakat. Berikut fasilitas dan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.14
Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2016

No.	Fasilitas Kesehatan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rumah Sakit	42	43	42	46	47
2	Tempat Tidur RS	4.538	4.538	4.745	4.873	6.154
3	Rumah Sakit Swasta	25	29	17	26	27
4	Dokter Umum	794	1.007	908	1.113	1.122
5	Dokter Gigi	262	290	269	320	323
6	Dokter Spesialis	276	569	354	347	583
7	Tenaga Medis RS	471	1.341	1.195	1.189	1.186
8	Perawat RS	1.627	3.791	3.027	4.573	4.529
9	RS Bersalin	13	14	18	10	10
10	Puskesmas	172	186	180	180	180
11	Pustu	568	576	661	689	669
12	Dokter Puskesmas	513	396	607	607	714
13	Pedagang Besar Farmasi	41	44	46	44	45
14	Apotek	371	398	435	561	561
15	Persentase Persalinan dengan Tenaga Medis	79,48	90,86	88,76	91,26	90,12

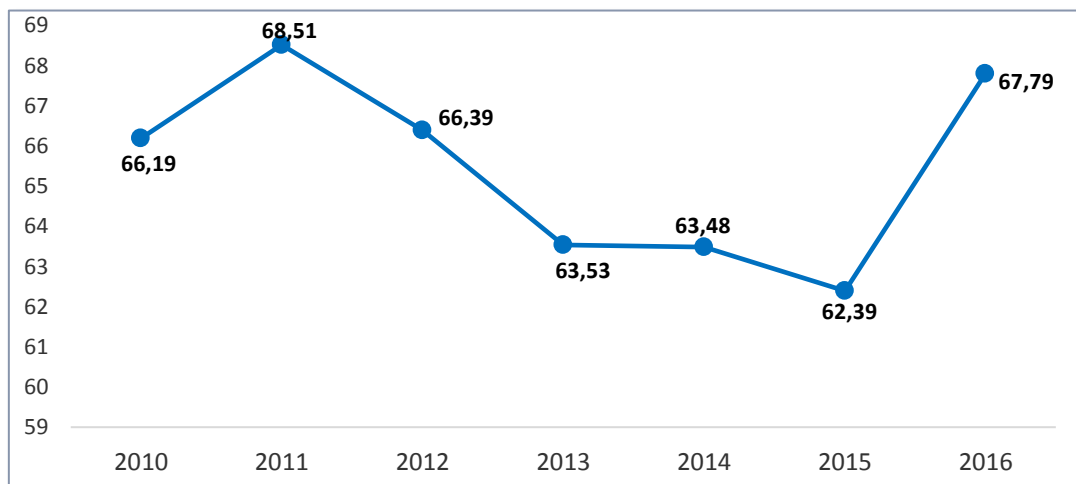
Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

C. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kemampuan kehidupan masyarakat sekaligus mengindikasikan daya saing sumber daya manusia suatu wilayah. Di Provinsi Kalimantan Timur, jumlah angkatan kerja meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.539.491 orang menjadi 1.717.892 orang. Meskipun begitu, tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan menjadi 67,79 persen dari sebelumnya sebesar 62,39 persen. Hal ini

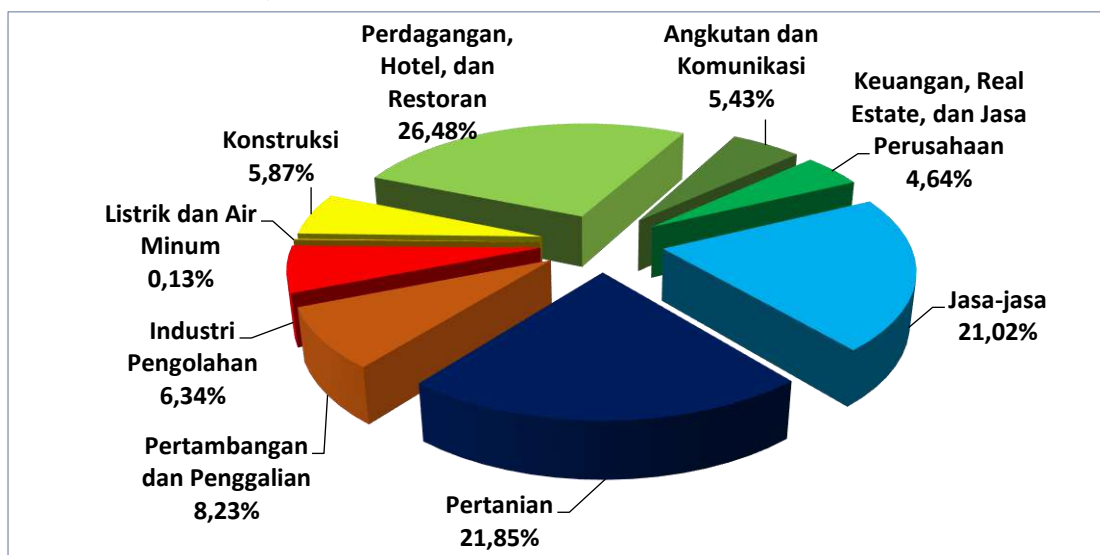
dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan ini juga bisa disebabkan oleh penimbangnya, yaitu jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja.

Gambar 2.18
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.19
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016



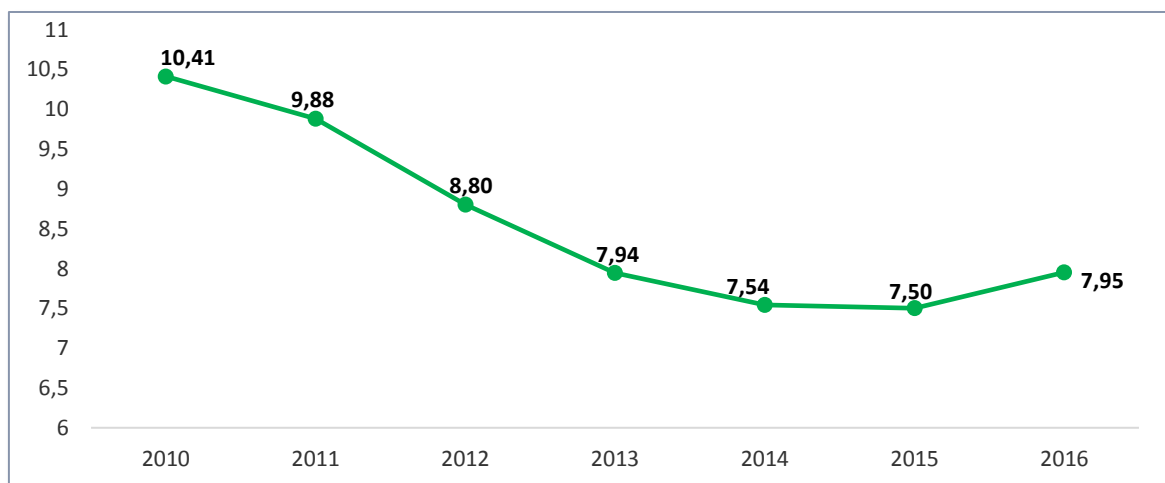
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Pada tahun 2016, hampir semua penduduk angkatan kerja memiliki pekerjaan yang terbagi dalam 9 (sembilan) sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada gambar 2.17 di atas. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran

mencapai 26,48%, diikuti oleh sektor pertanian yang mencapai 21,85 persen, dan yang paling sedikit bekerja di sektor Listrik dan Air Minum mencapai 0,13%.

Penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun di setiap tahunnya. Pada tahun 2016, tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,95 persen dimana angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 7,50 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, kebijakan pemerintah terkait angkatan kerja memberi dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur sehingga keberlanjutan program prioritas yang memberdayakan masyarakat harus terus dioptimalkan.

Gambar 2.20
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Tabel 2.15
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 (persen)

No	Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Paser	6,82	8,41	10,18	9,25	6,69	9,06
2	Kutai Barat	7,97	9,11	8,23	8,03	6,84	11,7
3	Kutai Kartanegara	11,53	7,68	7,89	7,37	7,65	10,22
4	Kutai Timur	12,71	9,41	6,49	6,09	5,65	5,14
5	Berau	9,33	8,21	5,79	5,85	10,05	5,72
6	Penajam Paser Utara	9,78	8,44	7,53	7,97	7,52	7,28
7	Balikpapan	11,76	12,14	8,95	7,95	7,56	5,95
8	Samarinda	9,22	10,9	9,71	8,57	7,56	5,61
9	Bontang	12,77	12,44	14,32	11,19	9,38	12,07
10	Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	4,75

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

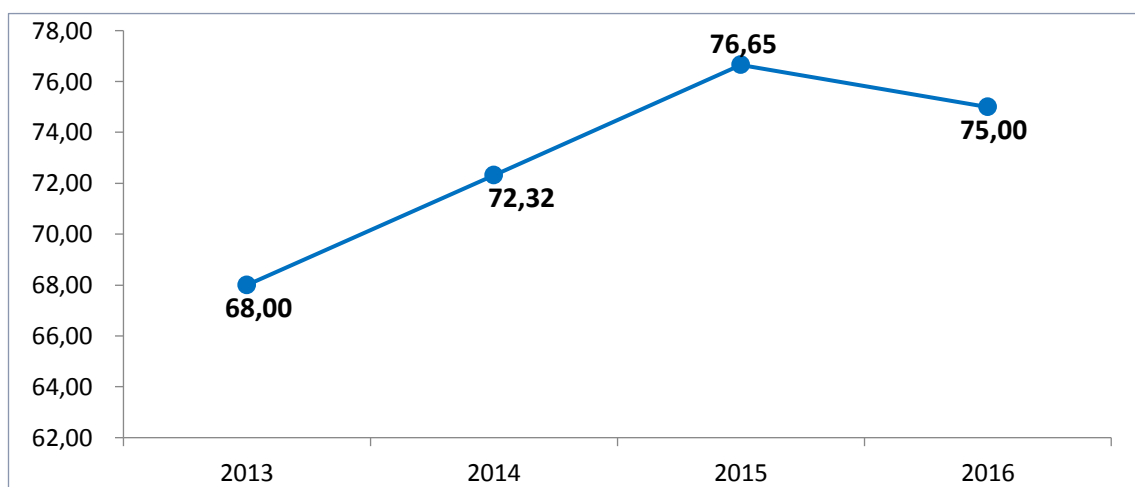
D. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1) Pelayanan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2016, Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 75,00 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (76,65). Meskipun begitu, secara series indeks ini mengalami kenaikan dalam jangka waktu empat tahun terakhir. Kenaikan ini bukan tanpa alasan mengingat berbagai program dan kegiatan terkait peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, perlu dirumuskan kembali berbagai program dan kegiatan baru terkait pemerataan pelayanan masyarakat agar setiap wilayah di Kalimantan Timur dapat merasakan hasil dari capaian pembangunan di berbagai bidang.

Gambar 2.21
Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2016



Sumber: SIDATA Kalimantan Timur

2) Pengelolaan Keuangan Daerah dan Integritas Kinerja Daerah

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2014 dan mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015 dan 2016. Sempat terjadinya penurunan status opini BPS ini menjadi “pekerjaan rumah” bagi pengelolaan keuangan daerah agar meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap setiap penggunaan keuangan daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi

Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

1) Pertanian Tanaman Pangan

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Produksi padi pada tahun 2016 mengalami penurunan, baik itu secara luas panen maupun total produksi padi. Pada tahun 2016, total produksi padi mencapai 305.194 ton dengan luas panen 80.343 ha akan tetapi produktivitasnya mengalami penurunan menjadi 3,79 ton/ha.

Tabel 2.16
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2016

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2010	110.288	459.477	4,17
2011	100.826	425.505	4,22
2012	101.960	424.670	4,17
2013	102.912	439.439	4,27
2014	100.262	426.567	4,26
2015	99.209	408.782	4,12
2016 ^{*)}	80.343	305.194	3,79

^{*)} Angka Ramalan II, Sumber: Dinas Pertanian Prov Kaltim, 2016

2) Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Komoditas perkebunan yang cukup mendominasi dan menarik banyak investasi luar daerah adalah perkebunan kelapa sawit yang hingga saat ini luas tanamnya mencapai 1,15 juta ha dan memiliki produksi mencapai 11,42 juta ton. Selain itu, komoditas karet juga cukup memberikan sumbangsih dalam perekonomian daerah dengan produksi karet yang cukup tinggi mencapai 58 ribu ton pada tahun 2016. Berikut produktivitas komoditas perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.17
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

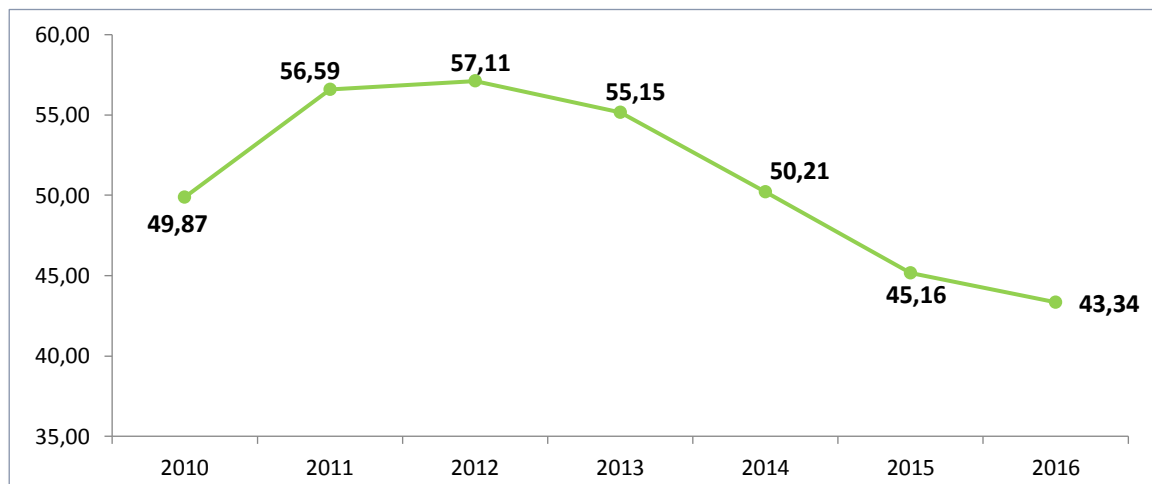
No.	Tahun	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Karet	115.912	58.136	0,50
2.	Kelapa	22.897	11.078	0,48
3.	Kopi	3.049	399	0,13
4.	Lada	9.382	4.728	0,50
5.	Kakao	7.076	2.479	0,35
6.	Kelapa Sawit	1.150.078	11.418.110	9,93

Sumber: Dinas Perkebunan, 2016

B. Energi Dan Sumber Daya Mineral

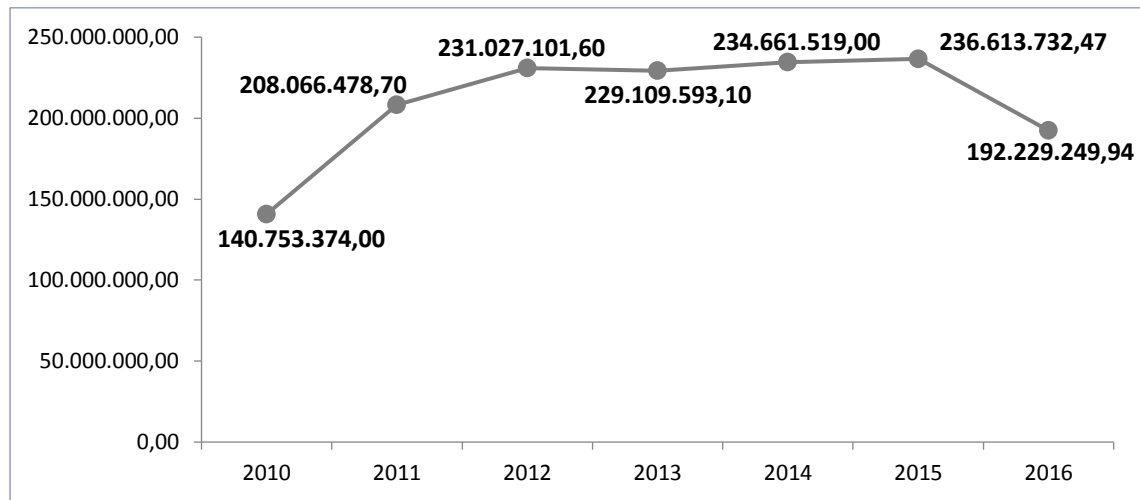
Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan di setiap tahunnya hingga tahun 2016 kontribusi menurun hingga mencapai 43,34 persen. Nilai PDRB pada pertambangan batubara mengalami penurunan dari tahun sebelumnya meskipun produksi batubara meningkat. Kelesuan ini bisa jadi karena gejolak perekonomian global sehingga berdampak pada nilai ekspor produk pertambangan dan penggalian. Kemudian, nilai PDRB pada minyak dan gas menurun karena produksi pertambangan migas juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Gambar 2.22
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Gambar 2.23
Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016 (Ton)



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2016

Tabel 2.18
Produksi Pertambangan Unggulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016

Tahun	Batubara (Ton)	Amoniak (Ton)	Urea (Ton)	Minyak Bumi (Ribu Barrel)	Gas Bumi (Ribu MMBTU)
2010	178.450.014,11	1.825.106,00	2.887.285,00	56.791,01	1.045.503,66
2011	208.066.478,72	1.745.336,00	2.793.766,00	53.023,68	911.529,96
2012	231.027.101,60	1.905.389,00	3.008.267,00	47.436,40	822.229,47
2013	229.109.593,05	1.939.081,00	3.007.632,00	42.983,64	713.549,85
2014	234.661.519,00	2.433.945,00	1.125.544,00	35.207,46	605.579,00
2015	236.613.732,47	1.087.077,00	3.019.349,00	36.605,80	609.744,52
2016	192.229.249,94*)			8.109.140	138.815.780

Ket: Karena Pelimpahan Data Amoniak dan Urea dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ke Disperindagkop pada tahun 2016 sehingga data belum tersedia karena pelimpahan tersebut

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, 2016

C. Jumlah investor berskala nasional dan internasional (PMDN/PMA)

Kenaikan jumlah investor merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian.

Tabel 2.19
Jumlah Investor PMDN/PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016

Tahun	PMDN	PMA	Total
2010	15	76	91
2011	78	53	131
2012	36	124	160

Tahun	PMDN	PMA	Total
2013	236	313	549
2014	48	54	102
2015	124	36	160
2016	317	43	360

Sumber: DPMPTSP Kalimantan Timur, 2016

D. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Dan Internasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis nilai PMDN/PMA di Provinsi Kalimantan Timur dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.20
Jumlah Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016

PMDN				
Tahun	Persetujuan (Juta Rp)		Realisasi (Juta Rp)	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2010	15	163.812,38	48	7.881.289,78
2011	78	71.229.379,88	56	16.196.330,39
2012	36	9.007.225,70	44	7.709.270,00
2013	236	34.110.240,30	103	18.441.377,30
2014	48	41.671.586,67	60	12.983.049,70
2015	124	23.935.504,40	143	9.611.313,10
2016	317	56.221.706,80	243	6.885.124,60
PMA				
Tahun	Persetujuan (US \$ 000)		Realisasi (US \$ 000)	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2010	76	44.848.379,58	56	988.710,14
2011	53	12.876.750,92	172	1.348.060,81
2012	124	5.771.255,50	167	2.529.900,00
2013	313	7.000.052,40	331	1.324.197,42
2014	24	3.146.114,70	297	2.145.665,10
2015	36	5.396.492,70	420	2.381.442,30
2016	43	7.876.807,30	471	1.181.859,20

Sumber: DPMPTSP Kalimantan Timur, 2016

E. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi, baik PMDN maupun PMA, di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2016

PMDN							
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	12.227	50.240	31.905	9.505	24.825	29.023
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	47	38	92	60	143	243
3	Rasio daya serap tenaga kerja	260,15	1.322,11	346,79	158,42	173,6	119,44
PMA							
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	9.001	35.579	65.706	27.055	66.230	22.204
PMA							
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2	Jumlah proyek seluruh PMA	135	152	331	297	420	471
3	Rasio daya serap tenaga kerja	66,67	234,07	198,51	91,09	157,69	47,14

Sumber: BPMPTSP Kalimantan Timur, 2016

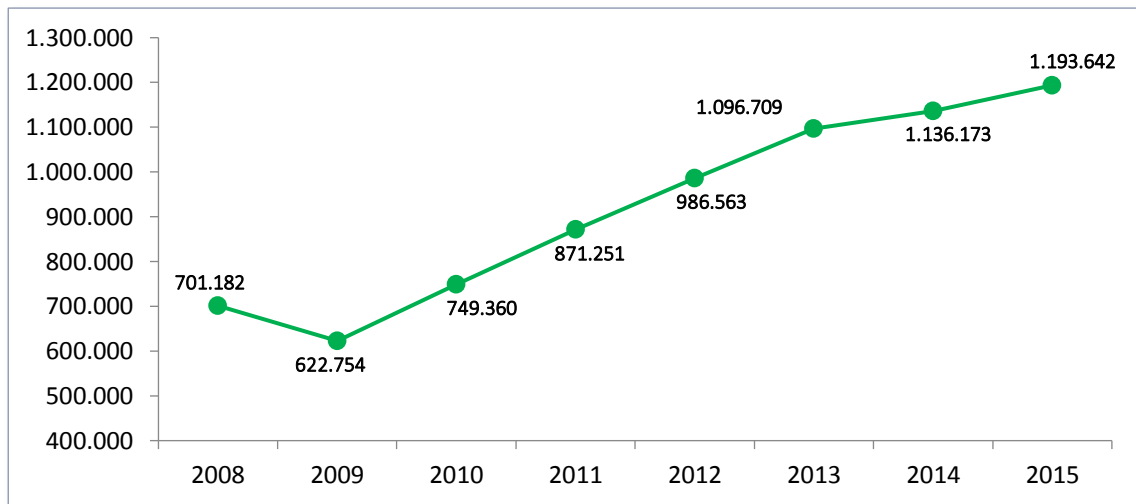
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama kurun waktu beberapa tahun, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik dimana pada tahun 2015 mencapai Rp.1.193.642,- per bulan.

Gambar 2.24
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2015 (Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

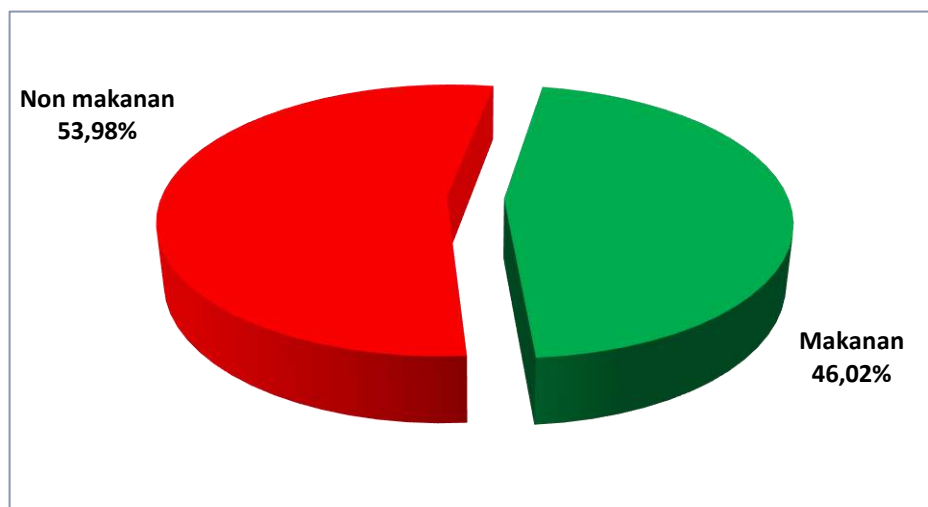
Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

Tabel 2.22
Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	385.993	467.532	535.643	588.003	627.372	644.291
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	749.360	871.251	986.563	1.096.709	1.136.173	1.193.642
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	51,51	53,66	54,29	53,62	55,22	53,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.25
Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan per Kapita sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

C. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di wilayah pedesaan. Selain itu, NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Semakin tinggi NTP-nya maka semakin kuat kemampuan/daya beli petani.

Pada periode tahun 2012-2016, NTP Provinsi Kalimantan Timur selalu berada di bawah nilai 100 yang berarti bahwa petani mengalami defisit/penurunan daya beli karena kenaikan penerimaan hasil produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga input biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangganya.

Tabel 2.23
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2016 (2012=100)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	129,43	130,69	111,58	117,00	120,03
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	132,02	137,14	111,66	118,66	122,30
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	98,04	95,30	99,93	98,61	98,14

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

Jika dilihat Nilai Tukar Petani berdasarkan subsektornya maka NTP tertinggi adalah NTP pada subsektor Peternakan yang mencapai 104,78 pada tahun 2016 naik jika dibandingkan tahun kemarin (102,79). Sedangkan NTP terendah berada pada subsektor hortikultura yang hanya mencapai 92,03 dimana angka ini menurun dari tahun sebelumnya (93,28).

Tabel 2.24
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Subsektor Tahun 2015-2016 (2012=100)

No	Uraian	NTP		% Perubahan
		2015	2016	
NTP Gabungan		98,61	98,14	-0,47
1.	Tanaman Pangan	95,29	96,61	1,32
2.	Hortikultura	93,28	92,03	-1,25
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	102,99	99,01	-3,98
4.	Peternakan	102,79	104,78	1,99
5.	Perikanan	98,38	99,89	1,51

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Luas Wilayah Produktif

Permasalahan legalisasi perencanaan pembangunan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, RTRW Kabupaten/Kota, dan Peraturan Zonasi belum mencapai sebuah kesepakatan. Pengembangan luas wilayah produktif harus terus mendapat kawalan dari instansi terkait mengingat produktifitas pertanian, perkebunan, maupun pemukiman merupakan lahan yang bersentuhan langsung ke masyarakat Kalimantan Timur. Gambaran tentang luas wilayah produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.25
Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman)
terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
1.	Berau	370.716	536.320	62,12
2.	Kutai Barat + Mahakam Ulu	515.012	862.681	59,70
3.	Kutai Kertanegara	420.324	936.710	44,87
4.	Kutai Timur	472.421	942.679	50,11
5.	Penajam Paser Utara	113.402	145.011	78,20
6.	Paser	301.226	445.964	67,54
7.	Balikpapan	22.538	34.069	66,15
8.	Bontang	5.643	10.002	56,42
9.	Samarinda	13.320	68.888	19,34
Jumlah		2.234.602	3.982.325	56,11

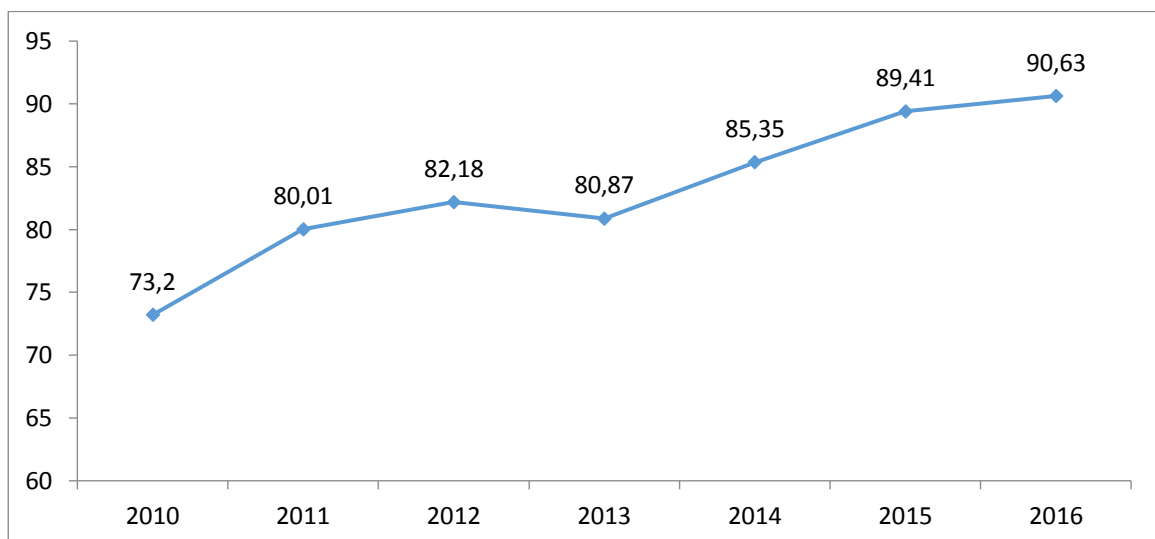
Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2013

B. Infrastruktur Pembangunan

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan fisik, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, perhubungan sungai, perhubungan udara, perhubungan laut, kawasan industri, air baku dan bersih, jaringan irigasi, serta perumahan.

Aspek daya saing daerah fokus fasilitas wilayah/infrastruktur bidang lingkungan hidup diukur dengan indikator persentase rumah tangga dengan sumber air bersih. Pada tahun 2010, persentase rumah tangga dengan sumber air bersih sebesar 73,20 persen dan peningkatan persentase terjadi di setiap tahunnya hingga pada tahun 2016 mencapai 90,63 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki akses ke sumber air bersih.

Gambar 2.26
Persentase Rumah tangga dengan Sumber Air Minum Bersih
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Perusahaan air minum di Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan segala daya dan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Pada tahun 2015 sendiri sudah terdapat 14 perusahaan air minum dengan kapasitas produksi efektif sebesar 7.181 liter/detik.

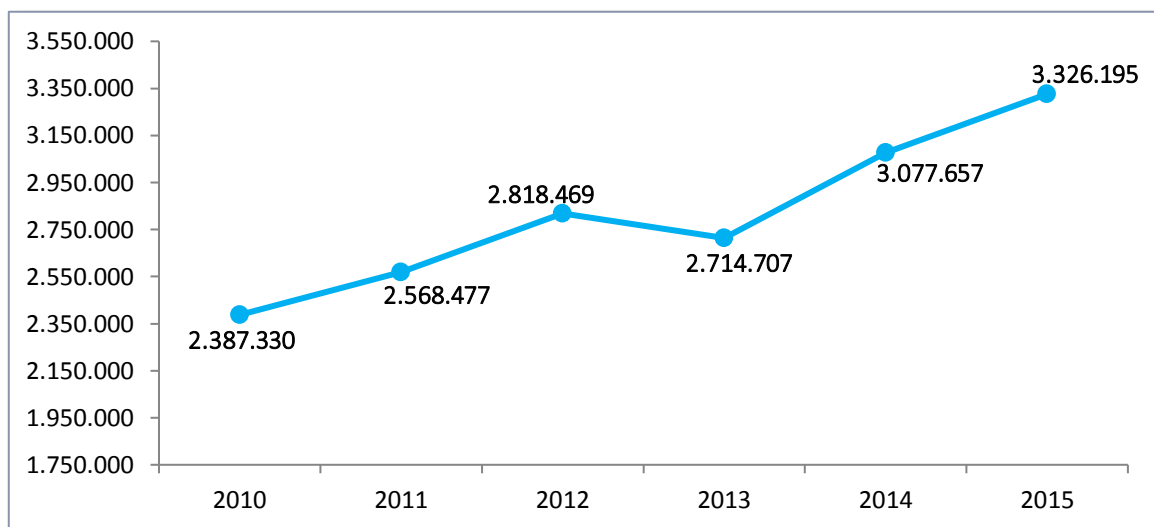
Tabel 2.26
Indikator Perusahaan Air Minum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2015

No.	URAIAN	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Perusahaan Air Minum	14	14	14	14
2.	Kapasitas Produksi Potensial	6.549	7.083	7.264	7.938
3.	Kapasitas Produksi Efektif	5.710	5.980	6.751	7.181
4.	Efektivitas Produksi (%)	92,09	84,43	92,94	90,46

Sumber: Data Pembangunan Kaltim, 2016

Dari segi kelistrikan, infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik di setiap tahunnya hingga mencapai 3.326.195 MWh pada tahun 2015. Pengguna listrik ini sebagian besar dirasakan oleh rumah tangga yang pada tahun 2015 berjumlah 713.891 rumah tangga dengan kapasitas listrik yang digunakan mencapai 1.682.001,81 MWh.

Gambar 2.27
Produksi Tenaga Listrik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 (MWh)



Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi, 2016

Tabel 2.27
Pelanggan Listrik Rumah tangga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015

NO	INDIKATOR	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	467.701	527.202	601.687	606.548	694.681	713.891
2.	Banyaknya tenaga listrik rumah tangga yang terjual (MWh)	1.179.356	1.311.181	1.483.455	1.431.524	1.481.827	1.682.001

Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2016

Infrastruktur pembangunan pada bidang perhubungan darat dapat dilihat dari konektivitas jalan lintas Kalimantan. Konektivitas jalan di wilayah Kalimantan Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga poros yaitu:

1. Poros Selatan, menghubungkan kawasan Kalimantan Selatan - Batu Aji/Kerang Dayu - Tanah Grogot - Kuaro - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redeb - Kalimantan Utara.
2. Poros Tengah, menghubungkan kawasan Samarinda - Tenggarong - Kota Bangun - Melak - Barong Tongkok - Kalimantan Tengah.
3. Poros Utara, menghubungkan Kalimantan Barat – Kalimantan Timur.

Pembangunan infrastruktur perhubungan dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, dimana angka rasionya menunjukkan 147,30 km per 1.000 km² (terdapat jalan sepanjang 147,30 km di dalam wilayah seluas 1000 km²) di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km². Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang harus dihadapi dalam pembangunan infrastruktur perhubungan, seperti:

1. Konsentrasi penduduk yang masih tidak merata dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berat;
2. Kendala pembebasan lahan dan penetapan harga yang disepakati;
3. Keterbatasan anggaran sehingga alokasi dana tidak proposional sesuai kebutuhan sehingga menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
4. Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi dan status kawasan lindung;
5. Belum ada kesepakatan pembiayaan atas beberapa pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
6. Dukungan swasta belum optimal.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum untuk panjang jalan, baik yang berstatus Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional, dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

NO	STATUS	ASPAL	KERIKIL	TANAH	LAINNYA
1	Nasional	1.448,39	0,00	7,60	165,32
2	Provinsi	1.022,55	279,08	182,80	99,70
3	Kabupaten				
TOTAL		2.459,41	306,40	125,20	321,89

Catatan : Dinas Pekerjaan Umum belum melakukan Monitoring ke Kabupaten/Kota sehingga data panjang jalan Kabupaten/Kota belum tersedia, Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur

Tabel 2.29
Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

NO	STATUS	BAIK	SEDANG	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
1	Nasional	814,20	716,38	72,07	38,40
2	Provinsi	187,79	1.024,91	194,92	173,97
3	Kabupaten/Kota				
TOTAL		1.001,99	1.741,29	266,99	212,37

Catatan : Dinas Pekerjaan Umum belum melakukan Monitoring ke Kabupaten/Kota sehingga data panjang jalan Kabupaten/Kota belum tersedia, Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modal usahanya di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah, baik itu segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya. Hal ini dikarenakan adanya jaminan keamanan berinvestasi akan menentukan keberlangsungan dan kekonsistenan gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berani menanamkan modal dan pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian wilayah. Salah satu analisis kinerja yang mempengaruhi iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas yang menunjukkan kondisi keamanan dan jumlah demonstrasi yang menunjukkan situasi demokrasi suatu wilayah.

A. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan bagaimana situasi keamanan di suatu wilayah sehingga aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan nyaman tanpa rasa takut. Selama tiga tahun terakhir terjadi fluktuasi pada angka kriminalitas per 10.000 penduduk dimana pada tahun 2016 terjadi 32-33 kasus kriminalitas diantara 10.000 penduduk. Namun yang perlu ditindaklanjuti adalah persentase tindak kejahatan yang diselesaikan hanya mencapai 72,41 persen. "Pekerjaan Rumah" inilah yang harus dituntaskan oleh aparat penegak hukum agar investor dapat nyaman dan aman dalam menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.30
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2016

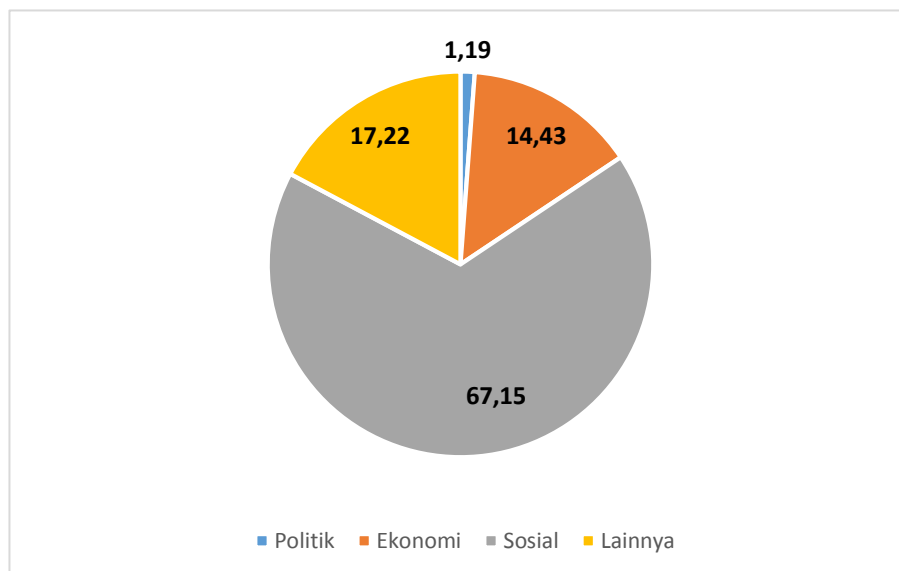
TAHUN	DILAPORKAN	TERTUNGGAK	DISELESAIKAN	% TINDAK KEJAHATAN DISELESAIKAN	ANGKA KRIMINALITAS PER 10.000 PENDUDUK
2012	9.950	3.545	5.405	54,37	31,10
2013	10.173	3.457	6.686	55,22	31,05
2014	9.918	3.196	6.722	57,73	29,59
2015	11.348	7.149	4.199	62,00	33,11
2016	12.620	3.482	9.138	72,41	32,87

Sumber: Polda Kaltim 2015

B. Demonstrasi

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Jumlah demonstrasi meningkat pada beberapa tahun ini mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2016, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 755 demonstrasi dimana sebanyak 14,43 persen (109 demonstrasi) merupakan demonstrasi terkait ekonomi; 67,15 persen (507 demonstrasi) terkait sosial; dan sisanya 18,41 persen (139 demonstrasi) terkait politik dan lainnya.

Gambar 2.28
Persentase Demonstrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016



Sumber: Polda Provinsi Kaltim Tahun 2016

Tabel 2.31
Jumlah Demontrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2016

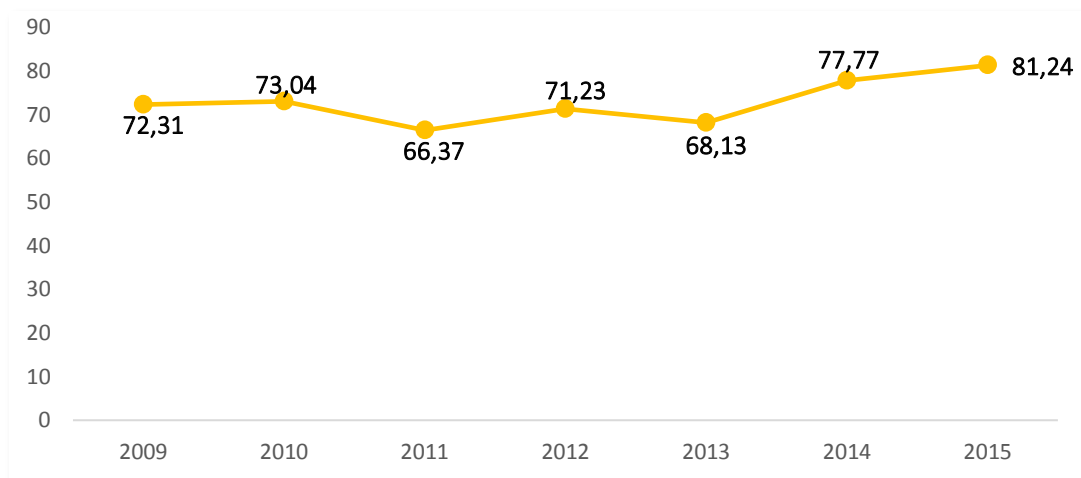
Tahun	Jenis Demo				Jumlah
	Politik	Ekonomi	Sosial	Lainnya	
2011	3	110	220	333	666
2012	3	149	254	406	812
2013	5	182	136	323	646
2014	19	224	189	432	864
2015	14	141	197	95	352
2016	9	109	507	130	755

Sumber: Polda Kaltim, 2015

C. Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksinya mencapai 81,24. Meskipun begitu, angka indeks ini masih cukup fluktuatif di setiap tahunnya sehingga pemerintah daerah harus mempertahankan prestasi demokrasi seperti masa sekarang ini.

Gambar 2.29
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

D. Iklim Investasi Daerah

Ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, sebanyak 317 investor dalam negeri melakukan 243 proyek sedangkan 43 investor luar negeri melakukan 471 proyek. Secara total, angka ini mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.32
Indikator Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri			Penanaman Modal Asing		
	Jumlah Proyek	Modal (Juta Rp)	Tenaga Kerja Indonesia	Jumlah Proyek	Modal (US\$ 000)	Tenaga Kerja Indonesia
2010	49	7.881.289,78	6.049	56	988.710,14	17.132
2011	56	16.196.330,39	12.227	172	1.348.060,81	9.001
2012	44	7.709.270,00	50.240	167	2.529.900,00	35.579
2013	103	18.441.377,30	36.552	331	1.324.197,42	65.706
2014	60	12.983.049,70	9.505	297	2.145.665,10	27.055
2015	143	9.611.313,10	24.825	420	2.381.442,30	66.230
2016	243	6.885.124,60	29.023	471	1.181.859,20	22.204

Sumber: DPMPTSP, 2017

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

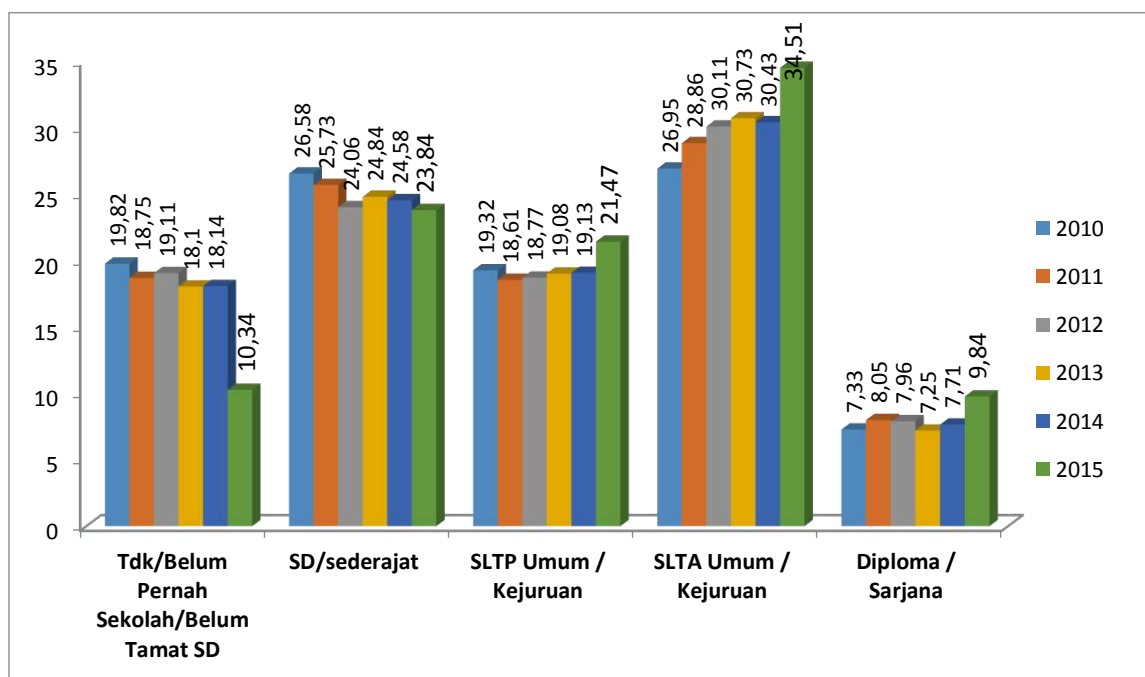
Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non produktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

A. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah. Berikut persentase penduduk Provinsi Kalimantan Timur usia 15 tahun ke atas berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan.

Gambar 2.30
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015



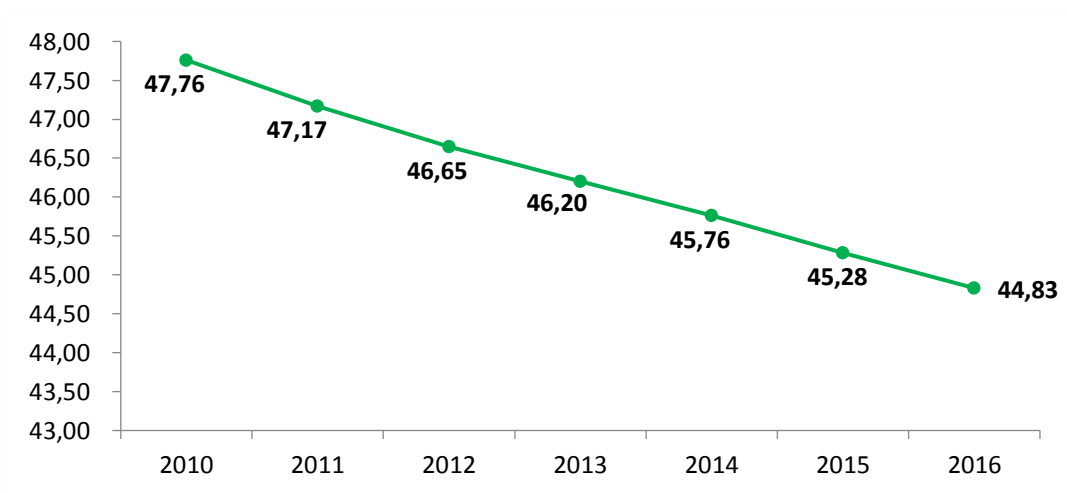
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Pada gambar di atas terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku perguruan tinggi hanya sebesar 9,84 persen saja, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA (34,51%) dan SD (23,84%). Hal ini mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan mutu sumber daya manusia. Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

B. Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif semakin menurun yang mengindikasikan bahwa beban tanggungan masyarakat produktif semakin ringan dari tahun ke tahun.

Gambar 2.31
Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Berdasarkan data kinerja pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas dan data kinerja daerah lainnya yang diolah dalam kertas kerja sesuai dengan amanat pada lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka secara keseluruhan indikator pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama empat tahun terakhir disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.33
Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja
Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2016

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				KET.
			2013	2014	2015	2016	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
I	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	Jumlah Penduduk	Jiwa	3.275.844	3.351.432	3.426.638	3.501.232	
1.2	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,25	1,71	-1,21	-0,38	
1.3	Laju Inflasi	%	9,65	7,66	4,89	3,39	
1.4	Pendapatan per Kapita	Juta Rp	64,12	61,17	50,63	50,27	
1.5	Indeks Gini		0,3341	0,3355	0,32	0,32	
1.6	Pemerataan Pendapatan Versi World Bank						
	- 40% Rendah	%	19,77	18,92	21,49	20,03	
	- 40% Sedang	%	37,67	36,85	37,91	38,91	
	- 20% Tinggi	%	42,55	44,23	40,60	41,06	
1.7	Indeks Ketimpangan Kemakmuran		0,57	0,54	0,54	*	
1.8	Persentase penduduk miskin	%	6,06	6,42	6,23	6,11	
1.9	Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan	kasus	6.686	6.722	4.199	9.138	
Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
1	Pendidikan						
1.1	Angka Melek Huruf	%	97,95	98,59	98,69	98,81	
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,87	9,04	9,15	9,24	
1.3	APK SD/MI	%	107,57	111,04	112,61	113,75	
1.4	APK SMP/MTs	%	91,06	91,49	97,90	98,00	
1.5	APK SMA/SMK/ MA	%	82,21	85,54	90,31	88,00	
1.6	APM SD/ MI	%	95,91	96,70	97,00	97,88	
1.7	APM SMP/MTs	%	76,10	78,73	79,06	90,00	
1.8	APM SMA/SMK/MA	%	62,22	67,03	67,78	75,00	
2	Kesehatan						
2.1	Angka Harapan Hidup	tahun	73,52	73,62	73,65	73,68	
2.2	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup		177,21	157,22	177,00	135,00	
2.3	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup		21,00	20,00	21,00	21,00	
2.4	Persentase Balita Gizi Buruk	%	3,90	3,70	3,70	0,10	
3	Ketenagakerjaan						
3.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,94	7,54	7,50	7,95	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				KET.
			2013	2014	2015	2016	
Fokus Budaya dan Olahraga							
1	Kebudayaan						
1.1	Jumlah Grup Kesenian	Unit per 10.000 penduduk	676	735	861	861	
1.2	Jumlah Gedung Kesenian	Unit per 10.000 penduduk	17	17	17	17	
2	Pemuda dan Olahraga						
2.1	Jumlah Klub Olahraga	unit	1.045	1.045	1.050	1.050	
2.2	Jumlah Gedung Olahraga	unit	47	55	97	97	
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Fokus Layanan Urusan Wajib							
1	Pendidikan						
1.1	Pendidikan Dasar						
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun	%	99,46	99,33	99,63	97,69	
1.1.2	Rasio murid terhadap sekolah						
	- SD Negeri	%	215,24	220,19	220,43	220,36	
	- SD Swasta	%	248,83	260,04	256,08	254,08	
	- MI	%	124,89	165,96	183,24	201,42	
1.1.3	Rasio murid terhadap guru						
	- SD Negeri	%	14	16,48	16,46	16,42	
	- SD Swasta	%	14	15,95	16,19	16,11	
	- MI	%	14	12,33	10,96	15,91	
1.2	Pendidikan menengah						
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah						
	- 13-15 tahun	%	96,62	97,99	97,92	89,13	
	- 16-18 tahun	%	73,10	80,50	80,68	74,25	
1.2.2	Rasio murid terhadap sekolah						
	- SMP Negeri	%	285,97	299,71	303,78	298,05	
	- SMP Swasta	%	148,51	155,96	157,32	154,89	
	- MTs	%	153,11	164,54	155,98	185,00	
	- SMA Negeri	%	371,26	370,11	395,19	399,5	
	- SMA Swasta	%	112,76	111,29	120,87	121,01	
	- MA	%	120,18	121,60	123,92	134,35	
	- SMK	%	264,04	291,87	332,01	327,75	
1.2.3	Rasio murid terhadap guru						
	- SMP Negeri	%	13	15,60	16,51	16,22	
	- SMP Swasta	%	11	11,23	13,70	13,42	
	- MTs	%	11	9,63	10,18	12,20	
	- SMA Negeri	%	14	13,95	14,99	15,08	
	- SMA Swasta	%	8	7,38	10,72	10,71	
	- MA	%	8	6,69	7,27	9,24	
	- SMK	%	12	11,21	16,36	14,22	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				KET.
			2013	2014	2015	2016	
1.3	Angka Putus Sekolah						
	- SD/MI	%	0,17	0,15	0,00	0,00	
	- SMP/MTs	%	2,89	1,77	1,74	1,82	
	- SMA/SMK/MA	%	26,71	19,40	19,27	19,00	
1.4	Angka Kelulusan						
	- SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- SMP/MTs	%	99,72	100,00	100,00	99,99	
	- SMA/SMK/MA	%	99,63	99,96	100,00	99,93	
1.5	Guru yang memenuhi kualifikasi min. S1/D-IV	Orang	*	65,30	65,30	65,00	
2	Kesehatan						
2.1	Rasio penduduk terhadap jumlah dokter	Orang	1.756	2.154	1.978	1.726	
2.2	Rasio penduduk terhadap jumlah puskesmas+pustu	Orang	4.380	4.097	4.036	4.124	
2.3	Rasio posyandu per satuan balita	(per. 1000)	24,87	29,33	31,02	33,40	
2.4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	(per. 1000)	4,09	3,57	3,40	3,39	
2.5	Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	%	90,86	88,76	91,26	90,12	
2.6	Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan	%	18,99	21,22	21,98	21,76	
2.7	Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	11,74	9,18	9,18	11,9	
2.8	Cakupan Puskesmas	%	180,58	174,76	174,76	174,76	
3	Pekerjaan Umum						
3.1	Panjang Jalan Provinsi	Km	1.762,07	1.628,07	1.628,07	1.584,13	
3.1.1	Kondisi Mantap	%	48,64	54,08	58,94	64,54	
3.2	Proporsi kondisi jalan baik	%	50,20	54,95	55,46	42,43	
3.3	Irigasi dalam kondisi baik	m	12.825	15.839,5	9.206	5.477	
3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	91,09	76,19	*	*	
3.5	Luas Lingkungan Pemukiman (Kumuh)	Ha	*	1.300	1.215	829	
4	Perumahan						
4.1	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih	%	80,87	85,35	89,41	90,63	
4.2	Persentase rumahtangga dengan air minum layak	%	*	78,48	78,13	92,25	
4.3	Persentase rumahtangga dengan sanitasi layak	%	91,09	76,19	61,3	69,9	
4.4	Persentase rumahtangga penerangan listrik	%	96,13	96,57	98,73	98,67	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				KET.
			2013	2014	2015	2016	
4.5	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	unit	1000	350	365	150	
5	Penataan Ruang						
5.1	Penyelenggaraan tata ruang	Skor	64,83	67,83	69,14	72,14	
6	Perhubungan						
6.1	Jumlah Kendaraan Bermotor	unit	2.045.550	2.233.273	2.231.182	2.298.117	
6.2	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kejadian	1.094	1.228	867	667	
6.3	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	m	7,81	7,09	7,12	6,89	
6.4	Jumlah Pengguna Angkutan Umum	Orang	10.913.500	10.913.500	9.241.800	12.127.125	
6.5	Jumlah penumpang angkutan laut yang turun	Orang	531.289	369.779	652.709	223.305	
6.6	Jumlah penumpang angkutan laut yang naik	Orang	494.985	290.611	342.802	229.755	
6.7	Jumlah penumpang angkutan udara yang datang	Orang	3.642.539	3.791.629	3.494.456	*	
6.8	Jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat	Orang	3.593.262	3.955.136	3.693.028	*	
7	Lingkungan Hidup						
7.1	Indeks kualitas air sungai		7,59	3,04	2	3	
7.2	Penegakan hukum lingkungan	%	86,21	86,36	100	100	
7.3	Persentase sampah terangkut per hari	%	64,61	90,33	66,43	87,51	
8	Kependudukan dan Catatan Sipil						
8.1	Kepemilikan KTP	Orang	1.425.905	1.092.011	1.148.718	2.373.545	
8.2	Kepemilikan Akta Kelahiran	Orang	1.351.261	695.301	1.071.135	3.441.731	
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
9.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (PNS Pemprov Kaltim)	%	12,87	13,35	12,93	14,75	
9.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	39,95	42,26	48,93	45,74	
9.3	Banyaknya anak terlantar (0-21 tahun)	Anak	30.978	30.927	30.927	11.510	
10	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
10.1	Persentase akseptor KB terhadap PUS	%	67,46	70,29	65,51	69,94	
10.2	Banyaknya peserta baru KB	Orang	70.336	76.760	59.807	69.945	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				KET.
			2013	2014	2015	2016	
10.3	Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	%	22,81	24,02	40,80	65,35	
11	Sosial						
11.1	Banyaknya panti asuhan	Unit	134	111	118	124	
11.2	Banyaknya anak yang diasuh di panti asuhan	Anak	7.368	7.296	7.296	7.256	
11.3	Banyaknya panti wredha	Unit	4	4	4	3	
11.4	Banyaknya penghuni panti wredha	Orang	200	267	277	210	
12	Ketenagakerjaan						
12.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63,53	63,48	62,39	67,79	
12.2	Persentase penduduk bekerja terhadap usia kerja	%	58,48	58,70	57,71	62,40	
13	Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah						
13.1	Jumlah Koperasi	Unit	5.916	5.319	5.287	5.004	
13.2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	360.733	423.267	445.682	452.309	
14	Penanaman Modal						
14.1	Realisasi proyek PMDN	Juta Rp	18.441.377,30	12.983.049,70	9.611.313,10	6.885.124,60	
14.2	Realisasi proyek PMA	US \$ 000	1.324.197,42	2.145.665,10	2.381.442,30	1.181.859,20	
15	Kebudayaan						
15.1	Jumlah event budaya	Event	56	55	60	60	
15.2	Jumlah peninggalan sejarah dan purbakala	Unit	161	162	165	165	
15.3	Jumlah museum	Unit	12	12	14	14	
15.4	Jumlah taman budaya	Unit	1	2	2	2	
15.5	Jumlah desa kerajinan tradisional	Desa	6	6	12	14	
16	Kepemudaan						
16.1	Jumlah karang taruna	Unit	1.322	1.251	1.251	*	
17	Ketahanan Pangan						
17.1	Ketersediaan pangan utama	%	74,43	68,89	67,62	75	
18	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
18.1	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masy. yang aktif	Unit	1.018	1.145	1.146	1.032	
18.2	Jumlah LSM dan Ormas	Unit	826	161	*	*	
19	Statistik						
19.1	Publikasi "Kabupaten/Kota Dalam Angka"	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
19.2	Publikasi "PDRB Kabupaten/Kota"	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
20	Komunikasi dan Informatika						
20.1	Website milik pemerintah daerah	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				KET.
			2013	2014	2015	2016	
20.2	Persentase penduduk usia 5 thn keatas menggunakan HP	%	95,34	96,27	97,12	100	
21	Perpustakaan						
21.1	Jumlah Perpustakaan	Unit	1.743	1.810	1.830	*	
22	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
22.1	Jumlah PNS	Orang	7.235	7.163	7.234	6.525	
22.2	Opini BPK		WTP	WDP	WTP	WTP	
22.3	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		68,00	72,32	76,65	75,00	
Fokus Urusan Pilihan							
1	Pertanian						
1.1	Produksi padi	Ton	439.439	426.567	408.782	305.185	
1.2	Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per Ha	Kw	42,70	42,55	41,20	32,05	
1.3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	6,62	7,00	7,50	8,06	
1.4	Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB	%	0,27	0,23	0,24	0,20	
1.5	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	%	2,55	3,75	3,77	4,26	
2	Kehutanan						
2.1	Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,13	1,16	1,33	1,34	
3	Energi dan Sumber Daya Mineral						
3.1	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan terhadap PDRB	%	55,15	50,21	45,16	43,34	
4	Pariwisata						
4.1	Jumlah wisnus dan mancanegara	Orang	1.912.661	3.941.979	4.320.025	5.547.435	
4.2	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,66	0,72	0,84	0,91	
5	Kelautan dan Perikanan						
5.1	Produksi Perikanan	Ton	214.651,1	430.171	239.959,5	248.005	
5.2	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	%	1,19	1,30	1,50	1,55	
6	Perdagangan						
6.1	Kontribusi subsektor perdagangan terhadap PDRB	%	4,29	4,58	5,13	5,55	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				KET.
			2013	2014	2015	2016	
6.2	Nilai ekspor	000 US	31.003.083	25.825.021	17.483.270	13.841.060	
6.3	Nilai impor	000 US	9.512.101	8.471.495	5.506.230	3.713.820	
6.4	Neraca perdagangan luar negeri	000 US	21.490.982	17.353.526	11.977.040	10.127.240	
7	Perindustrian						
7.1	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	17,96	19,32	20,61	20,51	
7.2	Kontribusi subsektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB	%	5,96	6,33	7,34	7,78	
ASPEK DAYA SANG DAERAH							
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
1.1	Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/Bulan	1.096.709	1.136.173	1.193.642	*	
1.2	Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	508.706	508.801	549.351	*	
1.3	Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita	Rp/Bulan	588.003	627.372	644.291	*	
1.4	PDRB per kapita	Juta Rp	143,92	145,86	146,46	144,83	
1.5	Pendapatan regional per kapita	Juta Rp	64,12	61,17	50,63	50,27	
1.6	Jumlah Koperasi	Unit	5.916	5.319	5.287	5.004	
2	Pertanian						
2.1	Nilai tukar petani	%	95,30	99,93	98,61	98,14	
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1	Perhubungan						
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	M	7,81	7,09	7,12	6,89	
2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
2.1	Jumlah kantor perbankan	Unit	580	587	611	678	
2.2	Jumlah akomodasi (hotel/penginapan)	Unit	542	349	667	695	
2.3	Jumlah rumah makan/restoran	Unit	1.340	716	1.530	1.620	
3	Lingkungan Hidup						
3.1	Persentase rumah tangga dengan sumber air bersih	%	80,87	85,35	89,41	90,63	
4	Komunikasi dan Informatika						
4.1	Daya listrik yang diproduksi	MWh	2.714.707,01	3.077.657,00	3.326.195	*	
4.2	Jumlah pelanggan listrik	Titik	951.117	864.503	1.032.213	*	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				KET.
			2013	2014	2015	2016	
Fokus Iklim Berinvestasi							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
1.1	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Juta Rp	30.892.361	37.872.765	39.379.342	1.180.049.251	
Fokus Sumber Daya Manusia							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		73,21	73,82	74,17	74,59	
1.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		63,12	53,74	55,96	*	
1.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		84,69	84,75	85,07	*	
1.4	Rasio ketergantungan		46,20	45,76	45,28	44,83	

Sumber: Gabungan dari berbagai sumber (diolah) * : Data Tidak Tersedia

2.2. Evaluasi Kinerja Tahun Lalu

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya harus memiliki validitas dan akurasi serta ketepatan waktu sehingga setiap data dan informasi yang dikembangkan sebagai analisis dan evaluasi pembangunan menjadi relevan. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Evaluasi pembangunan daerah pada periode sebelumnya yang menjadi dasar perumusan perencanaan pembangunan tahunan adalah evaluasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan melalui indikator kinerjanya (*outcome*). Indikator kinerja yang dimaksud adalah variabel untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Indikator kinerja inilah yang menjadi ujung tombak dalam evaluasi pembangunan daerah sekaligus penentu apakah pencapaian tujuan pembangunan daerah berhasil atau tidak.

Pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 ini, evaluasi pembangunan menggunakan evaluasi RPJMD tahun ketiga yaitu tahun 2016. Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2016 menunjukkan

kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi terutama dalam kaitannya dengan pemerataan hasil pembangunan dan perekonomian makro pembangunan daerah.

Evaluasi tersebut akan memberi masukan dalam perencanaan ke depannya apakah akan terus dilanjutkan, disempurnakan, atau akan diganti sepenuhnya dengan kebijakan serta program kegiatan yang baru untuk memberikan optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan seutuhnya. Berikut hasil evaluasi setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Misi I, “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi”, diharapkan menjadi motor penggerak bagi ketercapaian misi-misi yang lain sekaligus modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan analisis capaian program kegiatan pembangunan pada evaluasi misi pembangunan ketiga (evaluasi RKPD 2016), dari 18 Program Prioritas dengan 30 indikator capaian kinerja, maka terdapat 5 (lima) indikator yang masih jauh dari harapan target pembangunan serta 3 (tiga) indikator yang mendekati target pembangunan (*on progress*) meskipun belum maksimal. Sementara 22 indikator lainnya telah menunjukkan pencapaian target (bahkan sebagian telah melebihi target yang ditetapkan). Jika ditinjau dari sisi implementasi programnya, dapat dikatakan bahwa 13 dari 18 Program Prioritas (atau 72,22%) telah mencapai target, dan hanya 11,11% dikatakan sedang menuju target dan selebihnya di bawah target. Penurunan anggaran (APBN dan APBD) serta kemampuan daerah mengatasi kendala geografis sangat penting untuk dipertimbangkan agar dapat menyempurnakan kinerja pembangunan berikutnya mengingat pada tahun ini masih banyak “pekerjaan rumah” yang belum rampung.

Misi II, “Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan”, memiliki tantangan besar dalam pencapaiannya terlebih dengan upaya untuk mengupayakan target terbaru, yaitu sumber daya alam dan energi terbarukan. Misi kedua ini memiliki paling banyak program prioritas, yaitu mencapai 59 Program Prioritas yang harus dijalankan. Hasil evaluasi RKPD 2016 menunjukkan bahwa dari 61 indikator kinerja, ternyata 27 indikator diantaranya (44,26%) sudah menunjukkan pencapaian target, 14 indikator (22,95%) menuju target, dan sisanya 20 indikator (32,79%) belum mencapai target.

Ditinjau dari programnya, dapat disimpulkan bahwa dari 59 Program Prioritas terdapat 25 program telah mencapai target, 14 program menuju target, dan 20 program belum mencapai target. Namun demikian, dari beberapa angka capaian yang belum mencapai target masih bisa berubah mengingat angka capaian definitif untuk triwulan ke-IV yang belum disampaikan. Penekanan pada misi kedua ini adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan kapasitas atau keterampilan pelaku sektor pertanian (yang memiliki cakupan luas), pengembangan kewirausahaan dan ekonomi

alternatif (a.l. melalui penggalian potensi kepariwisataan) layak dipertimbangkan karena sangat penting untuk meningkatkan kinerja perekonomian pembangunan di masa depan.

Misi III, “Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata”, merupakan misi yang seharusnya paling konkrit dirasakan capaiannya, mengingat *output*-nya adalah infrastruktur fisik dan layanan jasa (a.l. transportasi dan komunikasi) yang sangat penting bagi kehidupan keseharian masyarakat.

Evaluasi RKPD 2016 terhadap program-program pembangunan pada misi ketiga menunjukkan bahwa dari 15 indikator kinerja pembangunan untuk 14 Program Prioritas, sebanyak 6 indikator diantaranya (40,00%) mencapai target, 8 indikator (57,14%) di bawah target, dan 1 indikator tidak dianggarkan program kegiatannya. Cukup tingginya angka di bawah target pembangunan dikarenakan dua hal, yaitu:

- a. Persetujuan anggaran yang tidak memadai sehingga hanya sebagian kegiatan saja yang dapat dilaksanakan; dan
- b. Beberapa angka kinerja baru bisa diperoleh jika telah tuntas selama 4 triwulan.

Mengingat pentingnya ketersediaan infrastruktur dasar dalam mendukung program pembangunan lainnya ditengah kendala geografis wilayah dan warga masyarakat yang tersebar hingga ke pedalaman, maka telah direkomendasikan untuk lebih selektif dan realistis dalam penetapan program, disamping kepentingan untuk membangun koordinasi yang lebih baik antar tingkat pemerintahan, dari pusat hingga ke kabupaten/kota.

Misi IV, “Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik”, merupakan misi yang sangat disorot oleh publik, mengingat peran pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah pada berbagai tingkatan dewasa ini senantiasa dinilai sangat tidak optimal.

Hasil analisis pada evaluasi RKPD 2015 khususnya misi keempat menunjukkan hasil yang menggembirakan dimana dari 13 indikator kinerja capaian untuk 12 Program Prioritas, terdapat 11 indikator (84,61%) telah mencapai target sedangkan Program Prioritas yang belum mencapai target adalah program pengembangan data statistik dan spasial serta program peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Misi V, “Mewujudan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim”, merupakan bagian dari upaya mendukung program global dan membawa Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi pelopor program-program prioritas dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Berdasarkan hasil dari evaluasi capaian kegiatan pembangunan misi kelima, dari 16 indikator capaian kinerja (16 Program Prioritas) terdapat 13 indikator (81,25%) telah mencapai target, 2 (dua) indikator kinerja program sedang proses, dan 1 (satu) indikator program belum mencapai target.

Program yang belum menunjukkan kinerja memuaskan adalah penanaman kembali/rehabilitasi mangrove dan program-program konservasi ekosistem bernilai konservasi tinggi. Berbagai program konservasi ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena dihadapkan pada berbagai kendala, seperti partisipasi para pihak non-SKPD termasuk dalam hal pasokan data yang masih rendah serta masih tingginya angka konflik sosial berkaitan dengan pemanfaatan/tenurial lahan. Koordinasi lintas sektor juga sangat dibutuhkan berkaitan dengan aspek lingkungan, yang sering kali menjadi tupoksi dari lembaga yang berbeda.

Dalam pengejawantahan misi pembangunan daerah, pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 memiliki 19 sasaran pembangunan daerah yang secara hierarki akan memberikan kontribusi dalam keberhasilan pencapaian misi pembangunan. Sasaran pembangunan daerah tersebut memiliki 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) atau sering disebut *impact indicators* yang memiliki fungsi sebagai sebuah ukuran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada setiap tahapannya.

Evaluasi sasaran pembangunan tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi tahun 2016 (atau data terakhir) dengan target kinerja 2016 dalam dokumen perencanaan pembangunan. Evaluasi ini dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan data dan informasi yang valid dan *up-date* sebagai bagian dari optimalisasi evaluasi pembangunan daerah.

Hasil kajian dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2016, didapatkan 16 dari 24 indikator kinerja sasaran pembangunan yang memuaskan dimana capaian target cukup memberikan hasil positif. Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa berbagai arah kebijakan serta program dan kegiatan yang dirumuskan dan diimplementasikan memiliki capaian yang sesuai dengan target sasaran sebesar 66,67 persen.

Capaian pembangunan jangka menengah fase ketiga ini memiliki beberapa kendala yang dirasa cukup berdampak signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Permasalahan yang cukup rumit dan kompleks dalam era pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah terkait kondisi perekonomian daerah yang bergejolak dikarenakan imbas dari isu global perekonomian internasional. Selain itu, permasalahan sosial kehidupan masyarakat serta permasalahan ketimpangan struktur perekonomian wilayah yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan perekonomian beberapa tahun terakhir menjadi salah satu fokus utama. Hal ini terlihat dari masih minimnya capaian pembangunan, berupa: penurunan tingkat kemiskinan yang menjauh dari target, tingkat pengangguran yang belum optimal penanganannya, serta pertumbuhan ekonomi yang masih jauh dari harapan. Kedua permasalahan ini memerlukan perhatian serius untuk pertimbangan kebijakan pembangunan kedepannya. Berikut capaian kinerja sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016:

Tabel 2.34
 Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2016

	Sasaran	Indikator (<i>Impact</i>)	Kondisi Awal 2013	Target Kinerja 2016	Realisasi Kinerja 2016	Interpretasi
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	IPM	73,21	77,28	74,59	On Track
2	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,85	13,50	13,35	On Track
3	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,87	11,00	9,24	On Track
4	Meningkatnya angka harapan hidup	Angka harapan hidup (tahun)	73,52	72,00	73,68	Melampaui Target
5	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	6,06	5,35	6,11	On Track
6	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran (%)	7,94	6,50	7,95	Off Track
7	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Paritas daya beli/PPP (Perkapita/perhari)	10.981	11.450	11.355	Melampaui Target
8	Meningkatnya daya beli masyarakat	Tingkat inflasi (%)	9,65	6,70±1	3,39	Melampaui Target
		Share pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB	14,14	17,70	17,90	Melampaui Target
9	Menurunnya Indeks Gini	Indeks Gini	0,3341	0,3200	0,315	Melampaui Target
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)	2,25	0,2±1	-0,38	On Track
		Pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)	5,45	1±1	-1,52	Off Track
		Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara	5,99	4±1	1,52	Off Track
11	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas (%)	5,65	8,00	8,06	On Track
		Laju pertumbuhan ekonomi Sektor pertanian dalam arti luas	6,44	4,73	0,46	Off Track
12	Tercapainya swasembada pangan	Rasio pemenuhan beras (%)	72,00	72,50	50,00	On Track
13	Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan	Bauran energi baru terbarukan (%)	0,02	1,62	1,27	On Track
14	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5,00	6,50	7,00	Melampaui Target
15	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	5,20	5,70	5,58	Melampaui Target
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Melampaui Target
16	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	68,00 (baik)	80,00 (sgt baik)	75,00 (baik)	Melampaui Target
17	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	70,75 (B+)	76,00 (BB)	77,37 (BB)	Melampaui Target

Sasaran		Indikator (<i>Impact</i>)	Kondisi Awal 2013	Target Kinerja 2016	Realisasi Kinerja 2016	Interpretasi
		Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tinggi (2-3)	Sangat Tinggi (3-4)	Tinggi	Melampaui Target
18	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	74,07	81,98	83,19	Melampaui Target
19	Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca	Intensitas Emisi (ton CO ₂ /PDRB US \$ juta)	1.500	2.000	1.384	On Track

Sumber: Evaluasi RPJMD tahun ketiga, * data belum tersedia

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan analisa evaluasi hasil capaian pembangunan dalam kerangka sasaran implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun ketiga yakni tahun 2016, secara umum dapat diasumsikan memiliki pencapaian yang cukup memuaskan pada berbagai sektor maupun bidang pembangunan daerah meskipun persentase capaiannya lebih rendah dibandingkan pembangunan tahun sebelumnya. Perencanaan pembangunan yang telah direalisasikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama ini memberikan dampak pada peningkatan berbagai bidang fisik maupun non fisik utamanya dalam menyejahterakan masyarakat secara merata dan berkualitas.

Keberhasilan pembangunan ini terlihat dari cukup mendekatinya realisasi capaian pembangunan dengan target pembangunan yang telah dirumuskan pada awal periode pembangunan jangka menengah. Data-data yang terlihat menunjukkan beberapa indikator mengalami trend peningkatan berbagai target pembangunan melalui indikator sasaran maupun indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan ini akan menjadi modal dasar dan positif bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya sebagai estafet untuk menyempurnakan pembangunan jangka menengah di Provinsi Kalimantan Timur. Disamping juga perbaikan beberapa program kegiatan untuk mengoptimalkan capaian pembangunan yang belum sepenuhnya seperti yang diharapkan.

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan selalu diiringi oleh permasalahan pembangunan baik permasalahan global maupun permasalahan khas di setiap daerah. Hal tersebut menjadi perlu sebagai bahan untuk melakukan berbagai antisipasi maupun minimalisasi dampak negatif dari permasalahan pembangunan meskipun dalam realitanya permasalahan pembangunan terkadang tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu atau dua periode pembangunan saja. Oleh karena itu, setiap rumusan perencanaan pembangunan mempunyai upaya-upaya dalam menyelesaikan permasalahan untuk mencapai target pembangunan sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berikut faktor penghambat (permasalahan pembangunan) beserta

upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasinya berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Tabel 2.35
Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
1. Meningkatnya Angka Melek Huruf	Angka Harapan Lama Sekolah	1) Keterbatasan Infrastruktur Pendidikan pada Daerah Perbatasan	1) Peningkatan Infrastruktur pendidikan terutama di daerah yang jauh dari pusat perkotaan (perbatasan). 2) Menuntaskan program wajib belajar 12 tahun 3) Mendorong partisipasi kelompok pendampingan masyarakat dan pelaku usaha dengan tanggung jawab sosial (CSR) dalam mengubah mindset tentang pendidikan untuk masa depan
2. Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	1) Masih terbatasnya fasilitas (akses pendidikan terutama pada kawasan terdepan, tertinggal, terluar/3T).	1) Pemberian beasiswa dan jaminan pendidikan untuk siswa miskin dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu terutama pada pendidikan tinggi 2) Penambahan dan pendistribusian guru bantu serta aplikasi terhadap Program Sarjana Mendidik di wilayah 3 T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) 3) Koordinasi program dan capaian kinerja kabupaten/ kota, termasuk meminimalkan ketimpangan pendidikan antar wilayah
3. Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	1) Kualitas pelayanan kesehatan yang belum efektif/efisien terhadap pasien 2) Belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan di daerah pedalaman, perbatasan dan terpencil 3) Distribusi tenaga medis belum merata	1) Meningkatkan kualitas kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan (termasuk pengobatan gratis) bagi masyarakat kurang mampu 2) Peningkatan jumlah dan durasi pelayanan (tidak terkecuali tenaga medisnya), khususnya di wilayah terpencil, meskipun telah tersedia lebih dari 100 puskesmas 24 jam di berbagai daerah 3) Melakukan berbagai terobosan pelayanan kesehatan (a.l. Pusat Kesehatan Keliling/ Terapung puskesmas pembantu/Pusban) 4) Penyebarluasan atau penyuluhan pola hidup sehat di kalangan masyarakat serta penggalan potensi obat-obatan berbasis material lokal.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
4. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya pemutusan hubungan kerja 2) Belum optimalnya program pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan infrastruktur untuk mendorong akses terhadap layanan publik yang lebih baik
5. Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia 2) Masih rendahnya minat dan kemampuan masyarakat dalam berwirausaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelatihan keterampilan kepada para pencari kerja 2) Peningkatan peluang dan kemampuan wirausaha melalui berbagai program pengembangan kewirausahaan
6. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Inflasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih tingginya ketergantungan terhadap komoditi strategis dari luar daerah 2) Belum optimalnya peran Pemda dalam mengatasi gejolak pasar 3) Lemahnya rantai distribusi komoditi strategis 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan produksi komoditi strategis daerah/local dan menjalin kerjasama dengan daerah lain penghasil komoditi strategis 2) Optimalisasi peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pada setiap Kabupaten/Kota 3) Membangun pasar logistic/pusat distribusi logistic daerah
7. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Pertumbuhan ekonomi non migas non batubara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya daya saing investasi 2) Struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan dan sektor pengolahan industri migas 3) Pusat pertumbuhan ekonomi yang terpusat pada Kabupaten/Kota yang memiliki keunggulan SDA dan infrastruktur yang relatif baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur (transportasi, air baku dan energi) untuk meningkatkan daya saing investasi 2) Peningkatan nilai tambah pada semua rantai produksi (hulu – hilir) komoditi unggulan daerah 3) Optimalisasi infrastruktur pendukung perekonomian Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi yang dimiliki
8. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Arti Luas	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih rendahnya produktifitas dan luas areal sektor pertanian yang ada 2) Berkurang/minimnya jumlah petani 3) Belum berkembangnya pusat-pusat agribisnis dan sentra pertanian di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sector pertanian 2) Perlindungan terhadap pelaku sector pertanian 3) Pengembangan agribisnis dan sentra pertanian daerah
9. Tercapainya Swasembada Beras	Rasio pemenuhan beras	<ol style="list-style-type: none"> 1) Luas tanam dan luas panen sawah yang belum optimal 2) Masih minimnya ketersediaan infrastruktur pendukung produksi padi 3) Masih kurangnya ketersediaan sarana produksi pertanian 4) Belum optimalnya sistem tata niaga padi pasca panen 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perluasan areal tanam padi 2) Peningkatan layanan infrastruktur pendukung produksi padi 3) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian padi dengan penerapan teknologi 4) Optimalisasi peran pemerintah dalam perbaikan tata niaga pasca panen

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
10. Meningkatnya Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Bauran energi baru dan terbarukan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Minimnya investor yang membangun energy baru terbarukan di daerah terpencil 2) Kepadatan penduduk yang tidak merata serta akses sarana prasarana yang tidak memadai menyebabkan lambannya pencapaian Rasio Elektrifikasi di desa-desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemenuhan dan pemberdayaan energi yang ramah lingkungan 2) Percepatan elektrifikasi di perdesaan yang belum berkembang, terpencil, perbatasan dan pulau kecil melalui system <i>off-grid</i>
11. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan jalan 2) Belum optimalnya konektivitas jaringan transportasi di pusat-pusat pelayanan wilayah (intra regional) dan antar pusat pelayanan (inter regional) 3) Sulitnya penyelesaian masalah sosial terhadap kebutuhan lahan infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kualitas pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur pembangunan 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar 3) Pemerataan dan pengembangan wilayah dengan prototype kawasan berkembang sekitarnya 4) Mendorong peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan lahan pembangunan infrastruktur
12. Terwujudnya Pemerintahan Yg Bersih & Bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi dan Opini BPK	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur 2) Manajemen pengelolaan asset daerah belum efektif dan efisien 3) Minimnya perencanaan terhadap pengelolaan keuangan 4) Kesalahan mindset “menghabiskan anggaran” bukannya “mengoptimalkan anggaran” 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan 2) Pengendalian dan pengelolaan asset daerah 3) Memprioritaskan area perubahan seluruh aspek pemerintahan 4) Percepatan pencapaian target penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.
13. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan publik di beberapa Perangkat Daerah belum maksimal 2) Masih kurangnya kesadaran aparatur sebagai pelayan masyarakat 3) Masih ada anggota masyarakat yang belum paham tentang persamaan hak warga dalam memperoleh pelayanan 4) Berkurangnya APBD yang berimbas pada efisiensi anggaran beberapa program pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perlu meningkatkan pelayanan publik 2) Perlu menjadi aparatur yang berkualitas dengan tetap bekerja dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku 3) Optimalisasi anggaran yang tersedia untuk pelayanan prioritas
14. Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Indikator kinerja utama Perangkat Daerah belum berorientasi hasil 2) Laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perlu revisi Renstra Perangkat Daerah (PD) 2) Perlu menerapkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi yang mencapai/belum mencapai target kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
15. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks kualitas lingkungan	1) Masih terjadinya kerusakan kawasan hutan strategis	1) Meningkatkan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial serta daya dukung DAS dan RTH
16. Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat emisi gas rumah kaca	1) Belum adanya rencana aksi dan strategi pelaksanaan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca yang terstruktur di Kabupaten/Kota	1) Penyusunan dan pelatihan untuk menghitung intensitas emisi gas rumah kaca dalam penyusunan RAD GRK di Kabupaten/Kota 2) Pembentukan pokja RAD GRK di Kabupaten/Kota

2.3.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan analisa data aspek pembangunan daerah dan rumusan permasalahan pembangunan daerah, maka isu strategis pembangunan di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. **Pembangunan SDM (Pendidikan Formal dan Non Formal)** : pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan kemajuan sebuah daerah. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan semakin baik sumber daya manusia yang ada, dan pada akhirnya akan semakin tinggi pula daya kreatifitas penduduk dalam mengisi pembangunan. Data BPS Kalimantan Timur menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah tahun 2016 sebesar 13,5 tahun. Data tahun 2016 menunjukkan anak usia pendidikan di Kalimantan Timur tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni anak usia sekolah dasar (SD) dan anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Data menunjukkan terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Selanjutnya data statistik BPS menunjukkan bahwa daerah yang memiliki angka putus sekolah yang tinggi adalah daerah-daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T). Beberapa permasalahan penyelenggaraan pendidikan, khususnya di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) antara lain; persediaan tenaga pendidik, distribusi tidak seimbang, insentif rendah, kualifikasi dibawah standar, guru-guru yang kurang kompeten, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang ditempuh, penerapan kurikulum di sekolah belum yang kurang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM anak usia sekolah di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T).

Penempatan tenaga pengajar yang belum proporsional, karena pengajar yang ada tidak memiliki kualifikasi akademik seperti yang diharapkan oleh sekolah. Akibatnya guru yang mengajar tidak mengikuti proses dan mekanisme penerapan kurikulum yang sebenarnya. Kedua karena fasilitas pendukung belajar, sekolah belum memiliki buku-buku sumber dan sarana lain seperti laboratorium dan arus listrik yang mendukung kegiatan pembelajaran. Ketiga, untuk

pembuatan perangkat dan proses, guru-guru hanya berbuat sebatas apa yang mereka tahu, tanpa mengikuti panduan yang berlaku umum. Ini juga menjadi suatu masalah yang terlihat di sekolah yang ada di daerah 3T. Meskipun pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia dinilai sukses, namun jumlah anak usia wajib belajar yang hanya sampai SD cukup besar. Ini menjadi pekerjaan semua pihak mulai dari pemerintah, kalangan swasta dan semua lapisan masyarakat perlu dilibatkan dalam membangun pendidikan di Kalimantan Timur agar pendidikan semakin merata.

Melihat permasalahan tersebut maka isu strategis pembangunan bidang SDM (pendidikan formal dan non formal) di Kalimantan Timur adalah :

- Peningkatan Pemerataan Pelayanan dan Fasilitas Pendidikan Serta Manajemen. Pemerintah perlu meningkatkan manajemen sistem pembangunan pendidikan di Kalimantan Timur yang meliputi pemerataan pelayanan fasilitas pendidik dan kependidikan, peningkatan kapasitas dan kualitas serta pemberian bantuan stimulan bagi anak usia sekolah yang kurang mampu,
- Tidak kalah penting adalah kurikulum pendidikan yang mengarah pada peningkatan kapasitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang dibutuhkan.

2. **Pembangunan Ekonomi** : Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah : Faktor SDM; Faktor Sumberdaya Alam; Faktor Sumberdaya Modal; Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari sisi faktor sumberdaya alam, Kalimantan Timur memiliki keunggulan komparatif namun masih belum didukung oleh faktor sumberdaya manusia dan faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur yang didominasi oleh sektor primer. Dalam hal ini belum ada proses pertambahan nilai dari produksi faktor sumberdaya alam. Proses pertambahan nilai sumberdaya alam masih dihadapkan pada lemahnya faktor modal yaitu infrastruktur pendukung pengolahan sumberdaya alam. Disamping itu faktor ilmu pengetahuan dan teknologi juga belum menjadi faktor yang berperan maksimal dalam pengolahan faktor sumberdaya alam yang melimpah. Sektor utama yang berperan dalam perekonomian Kalimantan Timur saat ini yaitu sektor pertambangan dan migas yang mendominasi struktur perekonomian sebesar 47% dari total PDRB Kalimantan Timur. Proses pertambahan nilai sektor pertambangan dan migas masih dihadapkan pada minimnya faktor modal yaitu energi dan transportasi dalam mendukung hilirisasi sektor primer tersebut. Sektor pertanian yang merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja belum sepenuhnya didukung oleh faktor sumberdaya manusia pertanian dan faktor ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Tukar Petani yang masih di bawah angka indeks 100. Permasalahan tersebut secara umum disebabkan karena proses produksi pertanian

masih konvensional dan belum didukung oleh faktor modal (infrastruktur) dan faktor ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melihat permasalahan tersebut maka isu strategis pembangunan Ekonomi Yang Mandiri di Kalimantan Timur adalah : Peningkatan Faktor Pendukung Utama Dalam Percepatan Perwujudan Kemandirian Ekonomi (Infrastruktur, Energi Dan SDM)

3. Peningkatan Integrasi Pembangunan Pertanian Dari Hulu Ke Hilir (Keterpaduan Proses Produksi Dan Pemasaran)

Dalam mewujudkan transformasi perekonomian daerah di Kalimantan Timur, sektor pertanian diharapkan sebagai sektor penting sebagai sumber utama pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Peranan sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi sektor utama penopang perekonomian Kalimantan Timur, mengingat semakin langkanya dan menurunnya sumberdaya alam, seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, sementara di Provinsi Kalimantan Timur. Pengembangan sektor ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Namun untuk meningkatkan peran sektor pertanian di Kalimantan Timur masih dihadapkan pada permasalahan :

- Peran Kelembagaan Petani : Melemahnya peran kelembagaan petani seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Kelompok Tani, Balai latihan pertanian dan penyuluh pertanian lapangan.
- Dukungan Fisik : Perlu dukungan infrastruktur fisik yang lebih optimal untuk menjamin ekstensifikasi. Juga perlu ketersediaan sarana produksi yang sesuai dengan tingkat penerapan teknologi dalam intensifikasi.
- Berkurangnya/alih Fungsi Lahan Pertanian: Lahan pertanian menyempit dan terpecah-pecah akibat konversi lahan produktif menjadi penggunaan non-pertanian dan proses pewarisan.
- Kebijakan Harga : belum adanya jaminan bagi pelaku usaha tani atas kepastian harga serta kesulitan pelaku usaha tani memperhitungkan kelayakan usahanya.
- Pembiayaan : Persepsi lembaga keuangan bahwa usaha tani tanaman pangan mempunyai resiko yang tinggi serta keterbatasan petani untuk mengakses permodalan bagi pengembangan usaha tani.

Melihat potensi dan permasalahan tersebut maka isu strategis pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Timur adalah reformasi kebijakan pertanian dengan konsep agriculture reform yang terintegratif dari proses hulu hingga ke hilir.

4. Perlunya Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Aksesibilitas Wilayah

Infrastruktur merupakan fasilitas yang dibangun untuk mendukung, membantu, dan mempermudah segala bentuk aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur yang dibangun oleh

pemerintahan dari hasil uang rakyat yang dikumpulkan melalui pembayaran pajak disebut dengan infrastruktur publik. Beberapa contoh infrastruktur publik yang dibangun oleh pemerintah yaitu jalan raya, bandara, stasiun, gorong-gorong, dan berbagai macam infrastruktur publik lainnya. Kelengkapan, pemerataan, dan kualitas infrastruktur yang lebih baik juga mengindikasikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah utamanya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Belum optimalnya dan meratanya penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, energi, dan kelistrikan secara merata menjadi salah satu kendala utama pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kesenjangan ketersediaan infrastruktur akan mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia baik dari sisi pendidikan, kesehatan, perekonomian maupun kehidupan yang layak. Selain itu, kondisi infrastruktur Kalimantan Timur sekarang ini masih dalam *on progress* pembangunan dan dalam hal ini Pemerintah Provinsi terus berupaya untuk meningkatkan dan melakukan pemerataan pembangunan di berbagai bidang. Sehingga hal ini akan meminimalisir kesenjangan ekonomi antara masyarakat perkotaan dengan di daerah pedalaman, perbatasan dan daerah terpencil.

Pembangunan aksesibilitas wilayah yang berkualitas di Kalimantan Timur dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan, sehingga masyarakat lebih mudah mencapai berbagai fasilitas pelayanan infrastruktur dasar seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Selain itu, keuntungan peningkatan aksesibilitas wilayah juga berdampak pada sektor perekonomian dimana jaringan infrastruktur yang efektif akan meningkatkan keterkaitan antar sektor dalam pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah.

Melihat permasalahan tersebut maka isu strategis pembangunan infrastruktur dasar dalam Pemerataan Pembangunan antar wilayah di Kalimantan Timur adalah Perlunya Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Aksesibilitas Wilayah.